

**ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN DJIK TERHADAP VIDEO
“TSAMARA MENJAWAB: 5 SESAT PIKIR FAHRI HAMZAH TENTANG
KPK”**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

Farhan Mochammad Rizaldi

145120507111014



ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

**ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN DJICK TERHADAP VIDEO
"TSAMARA MENJAWAB: 5 SESAT PIKIR FAHRI HAMZAH TENTANG
KPK"**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Farhan Mochammad Rizaldi

NIM: 145120507111014

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 10 Desember 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Sidang

Sekretaris Majelis Sidang

Ahmad Hasan Ubaid, S.IP.,M.IP

NIK: 2016078204211001

Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc

NIK : 201607 880511 2 001

Anggota Majelis Sidang 1

Anggota Majelis Sidang 2

Tri Hendra Wahyudi, S.IP.,M.IP

NIK : 201309 800707 1 001

Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP.,M.IP

NIK : 201208 850707 2 002

Malang, 10 Desember 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Uti Ludigdo, Ak

NIK : 196908 14 199402 1 001

LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 10 Desember 2018 dengan daftar penguji sebagai berikut:

TELAH DIREVISI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI

No.	Nama	Jabatan Penguji
1.	Hasan Ubaid, S.IP., M.IP NIP/NIK. 2016078204211001	Ketua Majelis Sidang
2.	Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc NIP/NIK. 2016078805112001	Sekretaris Majelis Sidang
3.	Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP NIP/NIK. 2013098007071001	Anggota Majelis Sidang 1
4.	Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP NIP/NIK. 2012088507072002	Anggota Majelis Sidang 2

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Mochammad Rizaldi
NIM : 145120507111014
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN
DJICK TERHADAP VIDEO "TSAMARA
MENJAWAB: 5 SESAT PIKIR FAHRI
HAMZAH TENTANG KPK"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Isi dari skripsi yang saya buat adalah benar-benar karya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya raih dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Malang, 12 Desember 2018

Yang membuat pernyataan



Farhan Mochammad Rizaldi

NIM: 145120507111014

CURICULUM VITAE

Nama : Farhan M. Rizaldi
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1996
Alamat : Jalan Murai Blok D 19 No. 4-5, Bekasi.
Nomor Telepon : 087782633042
Email : farhanrzd13@gmail.com
Pendidikan Terakhir : Program S1 Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya.

Pengalaman Kerja dan Organisasi

- Operation Staff Mixth Event Organizer (2015-2016)
- Project Officer Brawijaya Fashion Week 2016
- Project Officer Dies Natalis Universitas Brawijaya ke 54 (2017)
- Liason Officer Coordinator Hail Mixth 10 (2017)

Professional Skills

- Ms Office
- New Media
- Speaking & Writing in English
- Creative Media Plan
- Event planning

Personal Skills

- Communication
- Analytical Thinking
- Innovative
- Organized

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Terhadap Video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

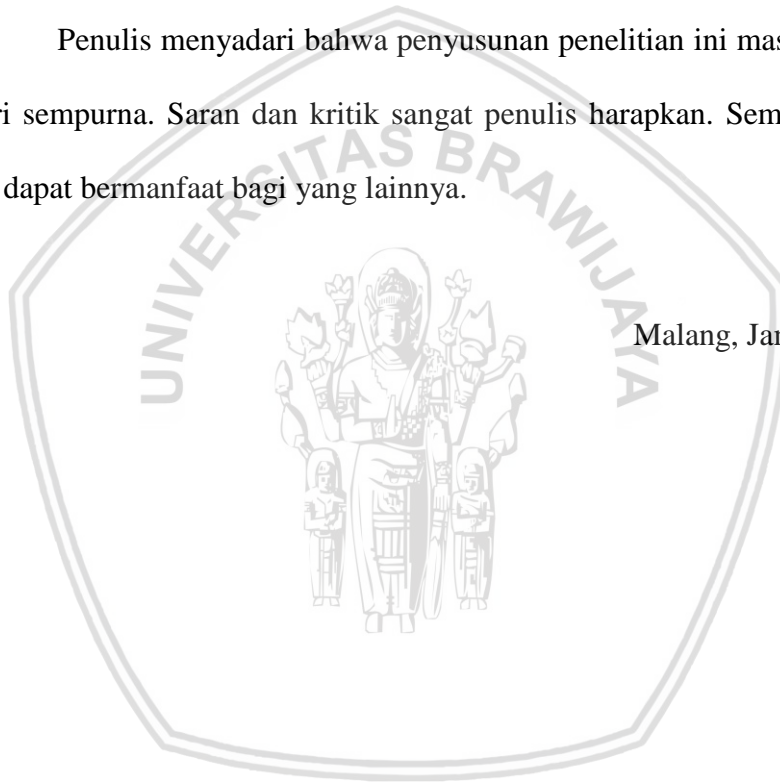
1. Prof. Dr.Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, serta Dr. Sholih Mu’adi, SH., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
2. Bapak Hasan Ubaid, S.IP.,M.IP dan Ibu Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan masukan yang bermanfaat hingga terselesaikannya penelitian ini.
3. Bapak Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP dan Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP selaku dosen penguji atas saran dan kritik sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu saya tercinta yang selalu mendukung berjalannya proses pendidikan saya hingga lulus menjadi sarjana.
5. Teman-teman yang selalu setia membantu saya didalam setiap pilihan kehidupan yang saya ambil, Jessica Hutabarat, The siblings, keluarga besar

Lucky Bastard, keluarga besar Guns official, keluarga besar Stalen Zuiger, keluarga besar Komsen Jatiasih, Kurt Cobain, Lemmy Kilmister, John Lennon, Jimi Hendrix, Joy Ramones, Dave Grohl, Sid Vicious, Robby Navicula, Iwan Fals dan semua orang yang menginspirasi saya dalam berkarya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Saran dan kritik sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya.

Malang, Januari 2019

Penulis



ABSTRAK

Farhan Mochammad Rizaldi (2018). Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk pada Video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”. Dosen Pembimbing: Hasan Ubaid dan Resya Famelasari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk pada video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”. Video ini terbagi menjadi lima bagian, namun pada penelitian ini hanya menganalisis dua video saja yaitu “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?”, karena kedua video tersebut memiliki muatan wacana yang patut dikritisi. Media dan interaksinya dengan khalayak menjadi begitu penting untuk selalu dikritisi. Dalam membangun realitas, media menambahkan beberapa elemen informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh informasi tersebut, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan diharapkan oleh pemilik kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu, begitu pula pada video reaksi ini. Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Van Dijk dengan pendekatan interpretif. Hasil penelitian ini adalah video reaksi yang dibuat Tsamara Amany secara struktur teks menggunakan gaya bahasa informal dengan satir dan sarkas. Apabila dilihat secara kognisi sosial, argumentasi Tsamara Amany pada video ini menunjukkan sikap politiknya dan PSI sebagai partai pro pemerintah, dan secara konteks sosial video ini dapat dianggap sebagai merupakan pencitraan politik karena mengandung wacana yang mempengaruhi, mendebat, dan bereaksi yang oleh Van Dijk dinilai sebagai sebuah praktik kekuasaan.

Kata kunci: Video Reaksi, Pencitraan Politik, Analisis Wacana Kritis Van Dijk.

ABSTRACT

Farhan Mochammad Rizaldi (2018). Political Science, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University Malang. Teun A. Van Dijk's Critical Discourse Analysis on "Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK" Video . Advisors: Hasan Ubaid dan Resya Famelasari.

This research aims to analyze how Teun A. Van Dijk's critical discourse analysis on "Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK" Video. This video is divided into 5 parts, but in this research only 2 were being analyzed which are "Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan" dan "Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?", because both of the videos are containing discourses worth to be criticized. Media and its interaction with audience becoming important to be criticized. In constructing reality, media adds more information to shaped the information itself according to certain group of interests' desires. This research is using Critical Analysis Discourse by Van Dijk with interpretive approach. This study is showing that Tsamara Amany's reactional videos was textually using informal style of language as well as using satire and sarcasm. As in social cognition Tsamara Amany's argumentation was showing her and PSI's side as a pro government party, in social context this video is considered as a political branding because contains discourse that influence, debate, and react which Van Dijk considers as a practice of power.

Key words: Reactional Video, Political Branding, Van Dijk's Critical Analysis Discourse.

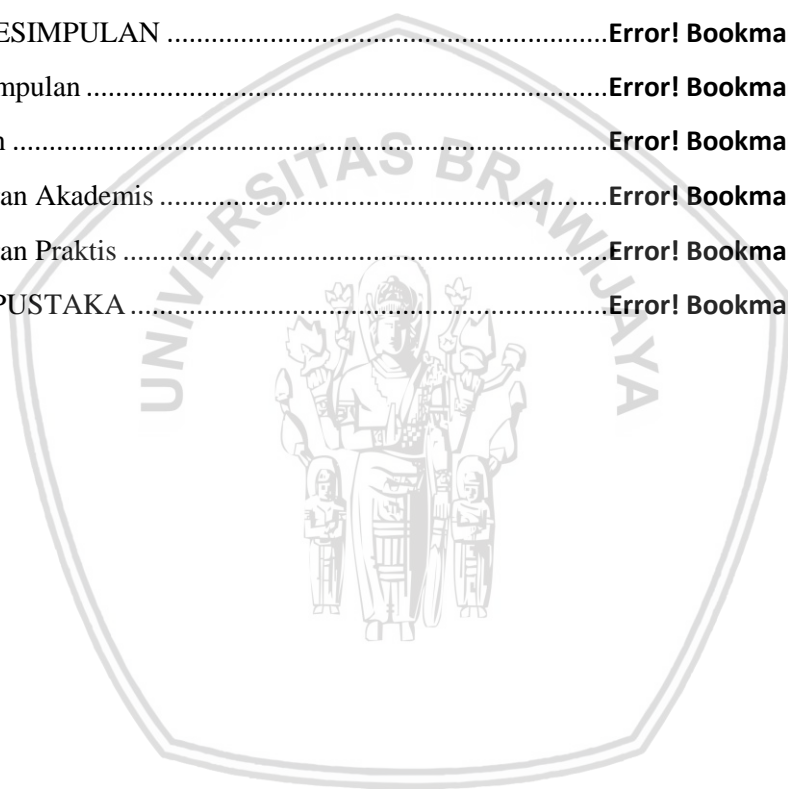
PENGANTAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk pada video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”. Video ini terbagi menjadi lima bagian, namun pada penelitian ini hanya menganalisis dua video saja yaitu “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?”, karena kedua video tersebut memiliki muatan wacana yang patut dikritisi. Media dan interaksinya dengan khalayak menjadi begitu penting untuk selalu dikritisi. Dalam membangun realitas, media menambahkan beberapa elemen informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh informasi tersebut, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan diharapkan oleh pemilik kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu, begitu pula pada video reaksi ini. Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Van Dijk dengan pendekatan interpretif. Hasil penelitian ini adalah video reaksi yang dibuat Tsamara Amany secara struktur teks menggunakan gaya bahasa informal dengan satir dan sarkas. Apabila dilihat secara kognisi sosial, argumentasi Tsamara Amany pada video ini menunjukkan sikap politiknya dan PSI sebagai partai pro pemerintah, dan secara konteks sosial video ini dapat dianggap sebagai merupakan pencitraan politik karena mengandung wacana yang mempengaruhi, mendebat, dan bereaksi yang oleh Van Dijk dinilai sebagai sebuah praktik kekuasaan.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Konsep Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Media dan Konstruksi Realitas.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Media Sosial dan Agenda Politik.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kerangka Berpikir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Profil Tsamara Amany.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Profil Fahri Hamzah.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Kasus Hak Angket KPK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.

5.1 Video 01 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Video 04 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?	Error! Bookmark not defined.
5.3 Fahri Hamzah dan KPK	Error! Bookmark not defined.
5.4 Tsamara Amany dan Sikap Pro KPK.....	Error! Bookmark not defined.
5.5 Video Reaksi sebagai <i>Political Branding</i> PSI	Error! Bookmark not defined.
BAB VI KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
6.2.1 Saran Akademis	Error! Bookmark not defined.
6.2.2 Saran Praktis	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Video 01 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan.....	47
Tabel 4.2 Video 04 Sesat Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tabel Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi.....	2
Gambar 1.2 Literasi Politik Wacana Korupsi PSI di Instagram.....	12
Gambar 1.3 Video Literasi Korupsi Edisi KPK.....	13
Gambar 1.4 Video Literasi Korupsi Edisi KPK (2).....	14
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1 Kerangka Analisis Wacana Kritis Moden Van Dijk.....	47





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial memainkan peranan yang semakin penting dalam strategi komunikasi kampanye politik yang dapat merefleksikan preferensi kebijakan dan pendapat aktor politik serta publik mereka¹. Selama beberapa dekade terakhir, perubahan dalam aspek komunikasi terjadi karena adanya perkembangan teknologi digital yang dengan sendirinya disertai proses modernisasi dan profesionalisasi kompetisi pemilu, telah memaksa elit politik untuk mengadopsi dan berintegrasi praktik komunikasi digital yang semakin canggih dalam kampanye mereka². Umumnya, isi pesan media sosial pada kampanye politik berisi informasi yang kaya akan isu-isu politik dan bagaimana isu tersebut dibingkai selama kampanye berlangsung. Perbedaan paling mencolok antara media baru dan media yang lebih tradisional adalah media baru memungkinkan warga sipil untuk berkomunikasi dalam skala besar dan dalam waktu nyata. Hal ini menjadi menguntungkan bagi aktor

¹Stieglitz, S., & Brockmann, T. (2012). Usage of Social Media for Political Communication. Pacific Asia Conference on Information System (PACIS), hlm.3

² Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S. A., Parnet, O., & Benoit, K. (2016). Social media and political communication the 2014 elections to the European Parliament. Electoral Studies, hlm.5

politik yang tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat dan tidak didukung oleh media tradisional yang besar pula.

Komunikasi politik pada media sosial sering dianggap sebagai sarana mengekspresikan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa kehilangan haknya atau terpinggirkan dalam tatanan tertentu, media sosial dirasa merupakan tempat di mana ruang publik yang tidak disensor tercipta, tempat berbagi informasi yang dapat dipercaya maupun komunikasi politik yang bebas dapat terjadi³. Media sosial dapat memberikan banyak keuntungan, namun di satu sisi media sosial juga digunakan untuk melawan oposisi pemerintah melalui pencemaran nama baik atau mendeskreditkan aktor atau lembaga tertentu. Dalam proses ini, bahasa merupakan faktor penting karena setiap aksi politik tidak lepas dari pengaruh dan permainan bahasa⁴.

Sebagai jembatan informasi, media baru atau dalam hal ini media sosial menyebarkan informasi yang kemudian dikonsumsi oleh publik, dipercayai, kemudian membentuk pandangan publik. Kemampuan lembaga maupun aktor politik dalam meramu dan mengelola suatu isu memiliki dampak yang luar biasa bagi

³Spaiser, V., Chadeaux, T., Donnay, K., Russmann, F., & Helbing, D. (2017). Communication power struggles on social media: A case study of the 2011–12 Russian protests. *Journal of Information Technology & Politics*, hlm.132

⁴Ibid., hlm.1

masyarakat⁵. Lembaga dan aktor politik mampu menciptakan citra sebagaimana yang dikehendaki melalui komunikasi politik yang ditampilkan pada media sosial. Citra yang dibangun tentu saja tidak terlepas dari ideologi dan tujuan masing-masing politisi. Pemilihan kata pada sebuah teks komunikasi politik tidak semata-mata kebetulan, tetapi merupakan representasi dari pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas⁶.

Ketika memproduksi sebuah wacana, aktor politik tentunya akan memunculkan pandangan-pandangan pribadinya pada wacana tersebut. Hal ini lumrah mengingat realitas dapat kita transformasikan sesuai keinginan kita dengan cara membentuk wacana. Sebagaimana tuturan seorang penutur yang dapat mempengaruhi perilaku atau pikiran khalayak, wacana menentukan sosok pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita dan wacana dapat membuat sesuatu diterima atau ditolak⁷. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami hanya sebagai studi bahasa meskipun pada akhirnya analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Disini bahasa dianalisis tidak hanya dari aspek

⁵Fajarwaty, P. U. (2015). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Tentang Penampilan Citra Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Headline Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Media Indonesia Periode November 2014 - April 2015. Depok: Universitas Indonesia, hlm.5

⁶Fajarwaty, P. U. (2015). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Tentang Penampilan Citra Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Headline Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Media Indonesia Periode November 2014 - April 2015. Depok: Universitas Indonesia, hlm. 10.

⁷Hoed, B. H. (2007). Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, hlm.15

kebahasaan, namun dihubungkan dalam konteks. Konteks berarti bahasa dipakai untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan⁸.

Salah satu wacana publik pada media sosial adalah video berjudul “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”, yang dibuat oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Video ini diunggah pada akun Instagram @PSI_id pada 7 Juli 2017. Hingga 2 Juli 2018, video ini telah dilihat sebanyak sekitar 6.514 kali dan menjadikannya sebagai konten Instagram PSI yang paling banyak ditonton. Video ini diawali dari silang pendapat antara Tsamara Amany, Ketua DPP Bidang Eksternal PSI dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR di Twitter. Keduanya berseteru mengenai kasus E-KTP dan hak angket KPK yang dikeluarkan oleh DPR. Tsamara pada argumennya memihak pada KPK, dan mendukung KPK untuk melakukan penyidikan terhadap kasus E-KTP yang menysasar beberapa anggota DPR. Sedangkan Fahri Hamzah merasa KPK gagal menjalankan tugasnya, dan merasa kasus E-TKP hanyalah rumor belaka. Tidak lama setelah *tweetwar* ini terjadi, PSI mengunggah video tersebut dengan Tsamara Amany sebagai narator. Dalam videonya, Tsamara memberikan reaksi terhadap beberapa komentar Fahri Hamzah baik di Twitter maupun dalam wawancara mengenai KPK dan kasus korupsi E-KTP. Reaksi yang diberikan berupa sanggahan dengan menggunakan data maupun opini-opini.

⁸Eriyanto. (2009). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS, hlm.100

Video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” adalah sebuah video reaksi bermuatan pandangan-pandangan Tsamara Amany, seorang Ketua DPP PSI mengenai kinerja KPK dan kasus korupsi E-KTP dan terhadap pandangan Fahri Hamzah mengenai hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam membentuk sebuah wacana seseorang pasti menyertakan nilai-nilai atau ideologi pribadi maupun kelompok yang diwakili. Terlebih setelah ditonton oleh kurang lebih 6000 *viewers*, maka lebih besar kemungkinan wacana tersebut mempengaruhi dan membentuk persepsi publik. Berangkat dari gambaran tersebut, maka media dan interaksinya dengan khalayak menjadi begitu penting untuk selalu dikritisi. Media dalam prakteknya adalah ruang di mana ideologi dipertarungkan untuk mendapatkan tempat dalam benak khalayak⁹. Siapa yang bertarung dalam kehidupan media menjadi penting untuk dilihat kekuasaannya. Dengan kata lain, media tidak saja sekedar sebuah saluran komunikasi akan tetapi juga sebagai sebuah institusi yang telah menjadi bagian dari masyarakat dengan pertarungan ideologi di dalamnya. Media sebagai institusi hadir dan bergerak dalam ranah publik, oleh karenanya keberadaan media seharusnya tidak lepas dari kepentingan publiknya itu sendiri. Segala kepentingan di luar publiknya terutama yang dominan dapat mempengaruhi proses komunikasi sehingga publik dapat terpinggirkan dari kepentingannya sendiri dan terciptalah kesadaran palsu.

⁹Eriyanto. (2009). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS, hlm.104

Adapun analisis wacana kritis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah milik Teun A. Van Dijk. Model analisis Van Dijk dikenal dengan ‘kognisi sosial’, karena menurut Van Dijk penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus diamati¹⁰. Maka analisis wacana kritis Van Dijk digunakan pada penelitian ini karena dalam menganalisis video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah” peneliti merasa diperlukan adanya penjelasan, apakah wacana ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya, sebagaimana merupakan salah satu karakter dari poin analisis Van Dijk yaitu konteks sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis wacana kritis Van Dijk terhadap video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”?

¹⁰Fajarwaty, P. U. (2015). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Tentang Penampilan Citra Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Headline Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Media Indonesia Periode November 2014 - April 2015. Depok: Universitas Indonesia, hlm.55

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis wacana kritis Van Dijk terhadap video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan yaitu:

Pengembangan konsep analisis wacana kritis khususnya model Van Dijk dan menambah literatur mengenai analisis wacana kritis pada konten Video khususnya yang mewakili ideologi partai .

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum, dan praktisi politik secara khusus yang berkeinginan untuk membuat konten video yang mewakili ideologi partai, sehingga mengetahui konten apa yang sebaiknya dibuat, dikonsumsi, dan medium apa yang paling baik digunakan agar dapat mewakili ideologi partai secara efektif dan berdampak baik bagi wawasan politik masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan di dalam penulisan maupun dalam penelitian yang sedang dilakukan. Teori yang terdapat dibawah ini adalah acuan selama penulisan dalam penelitian yang sedang berlangsung demi kelancaran penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang sesuai harapan.

2.1.1 Konsep Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa meskipun pada akhirnya analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Namun, bahasa yang dianalisis dalam analisis wacana berbeda dengan studi bahasa. Pada analisis wacana, bahasa yang dianalisis bukan dengan menggambarkan aspek kebahasaan semata, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Karaktersitrik penting analisis wacana kritis milik Van Dijk adalah tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi¹. Pada tataran karakteristik tindakan,

¹Eriyanto. (2003). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, hlm.8

wacana dipahami sebagai tindakan. Wacana harus dipahami sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Lalu, wacana dipandang sebagai sesuatu yang dieskspresikan di luar kesadaran. Untuk karakteristik konteks, analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi². Wacana disini dipandang, diproduksi, dimengerti dan dianalisis mengikuti suatu konteks tertentu.

Untuk karakteristik historis, wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu yang tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya³. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Karakteristik kekuasaan juga dipertimbangkan dalam analisis wacana. Di sini setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Karakteristik ideologi yang juga merupakan konsep sentral dalam analisis wacana. Hal ini karena teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. teori klasik tentang ideology diantaranya mengatakan bahwa

²Eriyanto. (2003). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, hlm.10

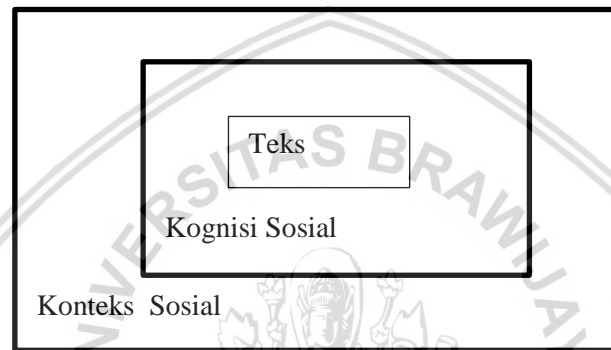
³Eriyanto. (2003). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, hlm.10-11

ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka⁴.

Analisis wacana kritis model Van Dijk dikenal dengan 'kognisi sosial'. Van Dijk merasa bahwa penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus diamati. Di sini juga harus dilihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita bisa memperoleh suatu pengetahuan mengapa teks bisa menjadi semacam itu. Wacana oleh Van Dijk digambarkan memiliki tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam suatu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari si pembuat wacana. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat akan suatu masalah⁵. Adapun gambaran model Van Dijk adalah sebagai berikut:

⁴Eriyanto. (2003). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, hlm.13

⁵Eriyanto. (2003). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, hlm.224



Gambar 3.1 Kerangka Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk

Sumber : Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*

Adapun uraian mengenai kerangka analisis wacana kritis Van Dijk adalah sebagai berikut:

1. Struktur Teks

a. Topik

Topik berita baru bisa disimpulkan setelah tuntas membaca, mendengar, atau menonton berita tersebut. Gagasan penting van Dijk, wacana umumnya dibentuk dalam tata aturan umum. Teks tidak hanya didefinisikan tetapi suatu pandangan umum yang koheren, yaitu bagian-

bagian dalam teks menunjuk pada satu titik gagasan umum, dan bagian-bagian tersebut saling mendukung satu sama lain untuk menggambarkan topik umum tersebut.

b. Skematik

Menurut van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung teori tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi menyembunyikan informasi penting. Teks atau wacana pada umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan hingga membentuk kesatuan arti.

c. Semantik

Semantik atau makna yang ingin ditekankan dalam teks dapat dilihat dari beberapa hal seperti latar, detil, maksud, dan praanggapan. Latar, detil dan maksud berhubungan dengan informasi mana yang ditekankan dan mendapatkan porsi lebih banyak. Sementara itu elemen praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks.

d. Sintaksis

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana kalimat yang dipilih.

Sintaksis dapat dilihat dari koherensi, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti.

e. Stilistik

Stilistik berhubungan dengan bagaimana pilihan kata yang digunakan dalam teks berita. Elemen stilistik dikenal dengan leksikon. Pada dasarnya leksikon menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata dari sekian banyak pilihan yang ada.

f. Retoris

Retoris berhubungan dengan bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan. Retoris dapat dilihat dari penggunaan grafis, metafora serta ekspresi. Grafis melihat penggunaan grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan. Elemen grafik memberikan efek kognitif, dalam arti ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan menunjukkan bahwa informasi tersebut penting dan harus diperhatikan.

2. Kognisi Sosial

Kognisi sosial melihat bagaimana suatu teks diproduksi. Kognisi sosial berkaitan dengan kesadaran mental wartawan yang membentuk teks tersebut. Van

Dijk berangkat dari gagasan bahwa teks sendiri tidak mempunyai makna, melainkan diberikan oleh proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Wartawan tidak dipandang sebagai individu yang netral, tetapi individu yang mempunyai bermacam-macam nilai, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang didapat dari kehidupannya.

Van Dijk menyebutkan bahwa peristiwa dipahami dan dimengerti berdasarkan skema. Skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental di mana di dalamnya tercakup bagaimana kita memandang manusia, peranan sosial, dan peristiwa. Ada beberapa macam skema/model yang dapat digambarkan berikut ini⁶:

a. Skema Person

Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang lain. Misalnya bagaimana wartawan Islam memandang dan memahami orang Kristen akan mempengaruhi teks berita yang ia tulis.

b. Skema Diri

Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang.

c. Skema Peran

⁶Eriyanto. (2012). Analisis wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LKiS, hlm.226

Skema ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati seseorang dalam masyarakat.

d. Skema Peristiwa

Skema ini barangkali paling banyak dipakai, karena hampir setiap hari kita selalu melihat dan mendengar peristiwa. Dan setiap peristiwa selalu ditafsirkan dan dimaknai dalam skema tertentu. Umumnya, skema peristiwa inilah yang paling banyak dipakai oleh wartawan.

3. Konteks Sosial

Titik penting dari analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi. Menurut Van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting: kekuasaan dan akses.

a. Praktik kekuasaan

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan suatu kelompok (atau anggotanya) yang mengontrol kelompok lain. Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atau sumber-sumber yang bernilai seperti uang, status dan pengetahuan. Kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui tindakan persuasif dengan jalan mempengaruhi kondisi mental seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.

Analisis wacana memberikan perhatian kepada dominasi. Dominasi direproduksi oleh pemberian akses yang khusus pada satu kelompok dibandingkan kelompok lain. Ia juga memberi perhatian atas proses produksi lewat legitimasi melalui bentuk kontrol pikiran.

b. Akses

Akses mempengaruhi wacana Analisis wacana memberikan perhatian pada akses, bagaimana akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak melalui kontrol atas topik dan isi wacana.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Media dan Konstruksi Realitas

Media adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang secara terus menerus memperbaharui informasi atau terus menerus mengulangi informasi sehingga media membuat informasi tersebut tak terelakkan, menciptakan ilusi bagi masyarakat

modern bahwa kita adalah bagian dari masyarakat global⁷. Gambaran realitas yang ditampilkan (dirancang, diproduksi) oleh media telah terbagi, satu sisi, tanpa alternatif, sering bertentangan dengan masalah nyata dan kesulitan yang dimiliki masyarakat modern. Media berperan menjadi penengahantara individu, kelompok, komunitas, institusi, dan aktor sosial lainnya, menjadi sarana komunikasi massa dalam masyarakat. Dalam membangun realitas, media menambahkan beberapa elemen informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh informasi tersebut, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan diharapkan oleh pemilik kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu.

Konsep konstruksionisme menjelaskan bahwa tiap individu secara subjektif menciptakan realitas yang intens bersama⁸. Terdapat tiga teori konstruksi realitas sosial yakni, *objective reality* yang merupakan pengalaman di dunia objektif. *Symbolic reality* yaitu semua ekspresi simbolik dari apa yang disebut sebagai realitas objektif, contohnya adalah produk-produk dari social media seperti berita, opini, atau gambar. Terakhir adalah, *subjective reality* yang merupakan realitas yang dibentuk sebagai proses penyerapan terhadap realitas *objective*⁹. Konstruksi sosial melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang diciptakan secara sosial oleh manusia. Berawal dari sebuah gagasan yang menerima pengetahuan tentang dunia tidak perlu

⁷Nišić, V., & Plavšić, D. (2014). The role of media in the construction of social reality. *Sociological Discourse*, hlm.73

⁸Afif. (2018). Konstruksi Realitas Sosial dari Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram. Depok: Universitas Indonesia, hlm.7

⁹ Ibid.hlm.16

mencerminkan kenyataan yang obyektif, konstruksi sosial berfokus pada hubungan manusia dan bagaimana hubungan mempengaruhi bagaimana orang memandang realitas¹⁰. Pengetahuan yang diperoleh seorang individu dari realitas pengalaman dan simbolis mereka, pada akhirnya tercampur bersama, dan dari campuran ini individu mempengaruhi individu tersebut membangun pola pikir mereka sendiri. Saat ini media online dapat menjadi sarana perkembangan konstruksi realitas.

Media *online* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan atau konstruksi realitas pada masyarakat saat ini¹¹. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Begitu juga dalam media sosial, bahasa merupakan instrumen pokok untuk menciptakan suatu realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Pada media sosial keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan membentuk suatu gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas media yang muncul dibenak khalayak.

2.2.2 Media Sosial dan Agenda Politik

Sifat natural media sosial yang membuatnya unggul adalah kemampuan berbagi berita politik maupun berita lainnya dengan sangat cepat dan jangkauan yang lebih luas¹². Salah satu alasan mendasar mengapa media sosial mampu mengubah

¹⁰ Surette, R. (2011). *Media, Crime, and Criminal Justice*. Wadsworth: Cengage Learning Belmont, hlm.30

¹¹ Hepp, A., & Couldry, N. (2017). *The Mediated Construction of Reality*. Malden: Polity Press, hlm. 8

¹² Salman, A., Saleh, M. A., Mustaffa, N., & Ali, M. N. (2016). *Social Media and Agenda Setting: Implications on Political Agenda*. Malaysian Journal of Communication, hlm. 38

komunikasi politik adalah dengan menjadi tambahan saluran dalam ruang komunikasi politik. Para pengguna membagikan reaksi mereka terhadap fenomena politik tertentu pada media sosial. Reaksi politik baik terhadap suatu pemberitaan maupun terhadap kampanye politik menjadi sangat tersedia dan bersifat publik. Sebagai contoh, Twitter saat ini mampu dijadikan tolak ukur sentimen masyarakat terhadap isu tertentu karena fungsinya sebagai catatan publik. Bahkan lebih signifikan, aktor dan wartawan politik menjadi semakin terampil dalam mempengaruhi liputan politik dengan merilis informasi secara strategis di profil media sosial mereka¹³.

Media sosial tidak hanya mampu menyajikan isu politik secara insidental kepada khalayak namun juga menyediakan forum bagi khalayak yang secara khusus tertarik pada isu politik tertentu untuk mendapatkan informasi. Media sosial dalam menyebarkan berita politik, melalui dua tahap yaitu produksi berita oleh media dan pemimpin opini (*opinion leader*) menyebarkan berita tersebut pada tautan media sosial mereka¹⁴. Peran *opinion leader* dalam menyebarkan informasi melalui media sosial dapat mempengaruhi *agenda setting*. Selain itu, kehadiran internet terbukti mampu mengurangi biaya kampanye partai. Namun, kehadiran internet sebagai media

¹³Jungherr, A. (2014). The Logic of Political Coverage on Twitter: Temporal Dynamics and Content. *Journal of Communication*, hlm. 240.

¹⁴Feezell, J. T. (2017). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. *American Politics*, hlm. 3

kampanye dapat menjadi ancaman bagi partai yang tidak mampu berkomitmen mengubah dan menyesuaikan dari kampanye yang konservatif menjadi kampanye yang menggunakan internet. Saat ini kita dihadapkan pada agenda politik di mana opini dan diskusi publik terpusat pada media sosial. Media konvensional tidak lagi mampu secara dominan mengontrol agenda politik di masyarakat¹⁵. Hal ini disebabkan munculnya media sosial dengan segala kemudahan berbagi berita dan menyebarkan berita lebih luas, kapan saja dan di mana saja.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki jenis dan metode penelitian yang sama. Adapun penelitian terdahulu ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan pembanding dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Elvinaro Ardianto	<i>Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Harian Pikiran Rakyat Dan</i>	Jurnal	-Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis	- Produksi teks Pikiran Rakyat cenderung brandingg reputation negatif Presiden SBY.

¹⁵Salman, A., Saleh, M. A., Mustaffa, N., & Ali, M. N. (2016). Social Media and Agenda Setting: Implications on Political Agenda. Malaysian Journal of Communication, hlm. 617

	<i>Harian Kompas Sebagai Public Relations Politik Dalam Membentuk Branding Reputation Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby)</i>		yang mengacu pada perspektif Norman Fairclough - Penelitian ini berfokus pada pemberitaan Harian Pikiran Rakyat dan Harian Kompas sebagai <i>Public Relations Politik</i> dalam membentuk <i>Branding Reputation</i>	Sedangkan produksi teks Kompas cenderung <i>Branding Reputation</i> positif Presiden SBY. Konsumsi teks Pikiran Rakyat adalah pembaca mempersepsi sama (negatif) dengan produksi teks yang dibuat oleh Pikiran Rakyat. Sedangkan konsumsi teks Kompas adalah pembaca berseberangan (negatif) dengan produksi teks yang dibuat oleh Kompas bahwa pemberitaan itu cenderung <i>Branding Reputation</i> positif Presiden SBY
Mulyadi Urip	<i>Gerakan Sosial Di Media Sosial: Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag #ShameOnYouSBY di Twitter</i>	Tesis	- Penelitian ini melihat media sosial memberi ruang peningkatan partisipasi publik dalam aktivitas politik, dimana dimulai dari ruang publik menjadi aksi politik. Salah satunya dengan munculnya gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY di Twitter yang menjadi <i>Trending</i>	- Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pemegang kekuasaan para elit politik. Karena melalui gaya atau sistem kepemimpinan SBY, relasi kuasa pemerintah dapat mengarah kepada relasi kuasa yang

			<p><i>Topic World Wide</i> selama periode 26-28 September 2014,</p> <p>- Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis, model Theo Van Leeuwen, yang secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor ditampilkan dalam teks</p>	bersifat dominan
--	--	--	---	------------------

sumber: Olahan Peneliti, 2018.

Penelitian terdahulu mengenai analisis wacana kritisi pada media sosial partai politik salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Dosen Jurusan Ilmu Humas Fikom Universitas Padjajaran, Elvinaro Ardianto dengan judul "*Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Harian Pikiran Rakyat Dan Harian Kompas Sebagai Public Relations Politik Dalam Membentuk Branding Reputation Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby)*". Penelitian ini terfokus pada pemberitaan Harian Pikiran Rakyat dan Harian Kompas sebagai Public Relations Politik dalam membentuk *Branding Reputation* Presiden SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang mengacu pada perspektif Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: produksi teks Pikiran Rakyat cenderung branding reputation negatif Presiden SBY. Sedangkan produksi teks Kompas cenderung *Branding Reputation* positif Presiden SBY. Konsumsi teks

Pikiran Rakyat adalah pembaca mempersepsi sama (negatif) dengan produksi teks yang dibuat oleh Pikiran Rakyat. Sedangkan konsumsi teks Kompas adalah pembaca berseberangan (negatif) dengan produksi teks yang dibuat oleh Kompas bahwa pemberitaan itu cenderung *Branding Reputation* positif Presiden SBY.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang ditulis oleh Mulyadi Urip pada tahun 2015 dari Universitas Diponegoro dengan judul "*Gerakan Sosial Di Media Sosial: Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag #ShameOnYouSBY di Twitter*" yang membahas mengenai hadirnya media sosial telah memberi arah penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pengguna internet khususnya media sosial, begitu powerful dalam memberdayakan ruang publik, sehingga berwujud gerakan sosial (*Social movement*). Media sosial memberi ruang peningkatan partisipasi publik dalam aktivitas politik, dimana dimulai dari ruang publik menjadi aksi politik. Salah satunya dengan munculnya gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY di Twitter yang menjadi *Trending Topic World Wide* selama periode 26-28 September 2014, dimana merupakan ungkapan kritik masyarakat yang ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI dan Ketua Umum Partai Demokrasi. Saat itu Partai Demokrasi melakukan aksi walkout, sehingga menjadi salah satu penyebab disahkannya UU Pilkada tak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan wacana gerakan sosial melalui tagar #ShameOnYouSBY sebagai upaya perlawanan di media sosial twitter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang

digunakan adalah analisis wacana kritis, model Theo Van Leeuwen, yang secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor ditampilkan dalam teks. Pusat perhatian dalam model ini yaitu eksklusif dan inklusi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pemegang kekuasaan para elit politik.

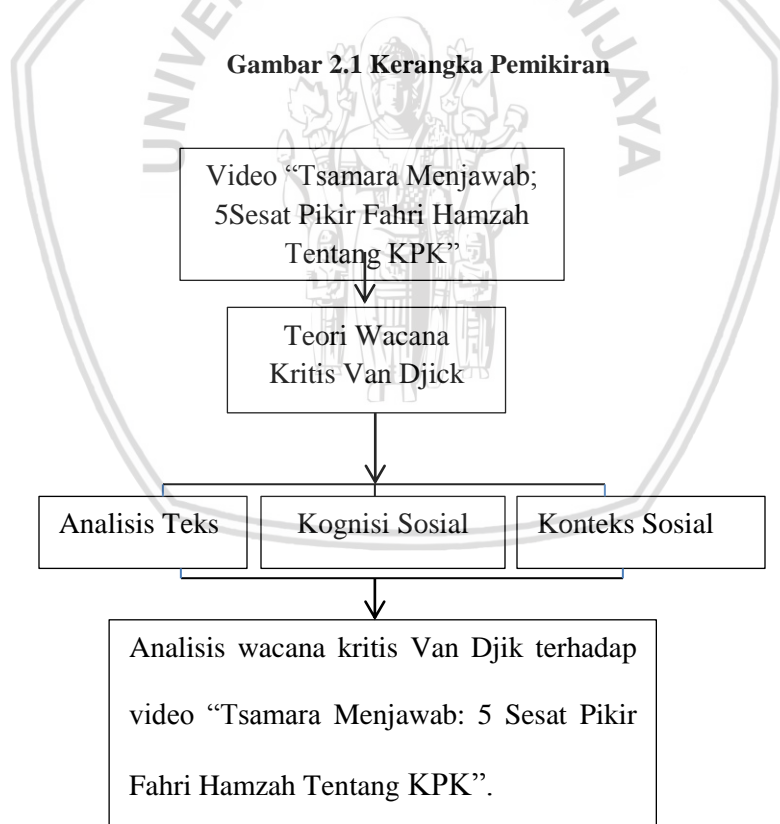
Karena melalui gaya atau sistem kepemimpinan SBY, relasi kuasa pemerintah dapat mengarah kepada relasi kuasa yang bersifat dominan. Sehingga perlawanan adalah sesuatu yang inheren dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan itu sendiri. Dimana ada penggunaan kekuasaan pasti ada resistensi atau perlawanan. Disini masyarakat menggambarkan pemegang kekuasaan (SBY) dalam pembahasan RUU Pilkada yang menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pencitraan dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Di sisi lain penelitian ini juga melahirkan refleksi teoritis dalam memahami ruang publik bahwa ruang diskusi dan ekspresi di internet belum dapat disejajarkan dengan ruang publik ideal seperti yang digambarkan oleh Habermas.

2.4 Kerangka Berpikir

Pelaksanaan penelitian terkait dengan video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” yang diunggah pada akun Instagram @psi.id, dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk

terhadap video tersebut. Adapun teori-teori yang mendukung pemikiran dari peneliti adalah tinjauan pustaka tentang analisis teori kritis menurut Van Dijk.

Penelitian ini berangkat dari adanya video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”. Untuk mengetahui bagaimana video ini dianalisis secara kritis, peneliti membedah video tersebut melalui tiga komponen analisis wacana kritis Van Dijk yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Olahan penulis, 2018.

Penelitian ini diawali munculnya video “Tsamara Menjawab; 5Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” pada penelitian ini hanya menganalisis dua video saja yaitu “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?”, karena kedua video tersebut memiliki muatan wacana yang patut dikritisi dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis milik Van Dijk. Analisis Van Dijk dilakukan dengan tiga tahap yaitu Analisis Teks, Kognisi Sosial, dan Konteks Sosial. Apabila video “Tsamara Menjawab; 5Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” telah melalui ketiga analisis tersebut, maka bisa didapati Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat¹.

Paradigma kritis lebih merujuk pada penafsiran. Dengan penafsiran kita akan mendapatkan dunia dalam, masuk menyelami teks dan menyingkap makna yang ada di baliknya². Paradigma kritis tidak mengenal realitas yang benar-benar riil, karena realitas yang muncul adalah realitas semua yang terbentuk bukan melalui proses alami melainkan dibentuk oleh proses sejarah, kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks media, paradigma kritis memandang media bukan suatu saluran yang bebas dan netral. Media justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok lainnya.

¹Nazir, Mohammad. (1998). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 24

²Eriyanto. (2012). Analisis wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LKiS, hlm 80

3.2 Metode Penelitian

Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Hal tersebut didasari oleh penggunaan data bahasa berupa teks di media massa yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Bolgan dan Taylor³ pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah analisis wacana kritis Van Dijk terhadap video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” untuk mengetahui wacana kritis mengenai video reaksi serta tujuan dibaliknya melalui analisis terhadap narasi dan teks. Video Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” terbagi menjadi lima video, namun pada penelitian ini hanya menganalisis dua video yaitu Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?”, karena kedua video

³ Anshori, Muslich & Sri Iswati (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.13

tersebut memiliki muatan wacana yang patut dikritisi. Kedua video tersebut diunggah pada 7 Juli 2017 dan sudah ditonton kurang lebih 6000 kali pada Juli 2018.

3.4 Unit Analisis Data

Setiap unit akan dianalisis, digambarkan atau dijelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan secara deskriptif. Unit analisis yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari video, narasi video, dan *caption* video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” khususnya pada episode “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?”.

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland⁴, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya untuk data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Video realasi berjudul “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?” yang keduanya diambil dari akun Instagram @psi.id.
2. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (2003) oleh Eriyanto.

⁴Moleong, P. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 76

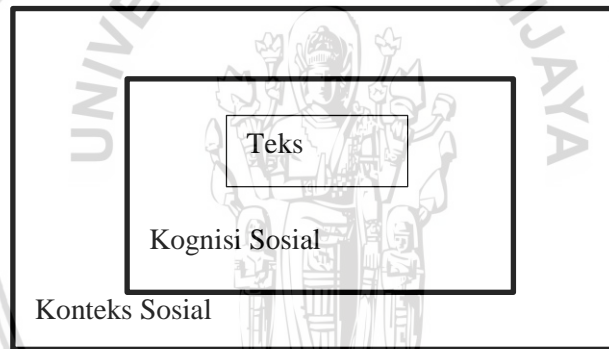
3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, majalah, atau jurnal) yang terdapat di perpustakaan, internet atau instansi lain yang dapat dijadikan analisis dalam penelitian ini. Adapun dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah video berjudul “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan” dan “Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?” yang keduanya diambil dari akun Instagram @psi.id. Kedua video ini dipilih karena peneliti mengindikasikan adanya wacana kritis yang bermuatan kognisi dan konteks sosial. Konten video reaksi pada Instagram PSI dipilih karena memiliki pengikut sebanyak 89.300 (per tanggal 30 Oktober 2018), dan video reaksi tersebut telah ditonton sebanyak kurang lebih 6.000 kali sehingga dengan banyaknya pengikut dan penonton video, konten tersebut memungkinkan memberi pengaruh terhadap khalayak.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk dianalisis dan diberikan interpretasi dengan cara mengklasifikasikannya dengan kerangka teori kemudian disimpulkan maka selanjutnya adalah melakukan analisis data. Setelah diperoleh wacana yang akan dianalisis, maka sebagai rujukan adalah dengan menggunakan analisis wacana model Teun van Dijk yang terdiri dari tiga elemen yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Dari beberapa teknik analisis data, peneliti merasa perlu meneliti wacana dengan menggunakan teknik van Dijk. Teknik ini dirasa cocok dibandingkan dengan analisis wacana (*discourse analysis*) lainnya yang lebih mengarah kepada ideologi yang dikemukakan oleh Norman Fairclough atau tentang kekuasaan kaum mayoritas kepada kaum minoritas oleh Theo Van Leeuwen dkk. Karena dalam penelitian ini, lebih ingin membongkar mengenai konstruksi realitas dalam dimensi wacana teks berita tersebut, serta dengan kedua unsur wacana van Dijk lainnya.



Gambar 3.1 Kerangka Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk

Sumber : Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam teknik analisis wacana van Dijk ini, terdapat tiga elemen ini yaitu, pertama, dimensi teks yang terdiri dari struktur makro, yaitu makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks, elemennya adalah tematik. Superstruktur, yaitu kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan, elemennya adalah skematik. Struktur mikro, makna global dari suatu teks yang dapat diamati

dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks, elemennya adalah semantik, sintaksis, stilistik dan retorik. Kedua, yaitu kognisi sosial yaitu mempelajari proses produksi teks bagaimana penggagas atau penulis mengetahui dan memahami peristiwa yang sedang digarapnya. Ketiga, konteks sosial yaitu mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.





BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Tsamara Amany

Tsamara Amany lahir di Jakarta, 24 Juni 1996. Pada awal tahun 2018 menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina. Ia pernah magang di kantor Balai Kota Jakarta periode Januari – April 2016 ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur. Ia sekarang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Bidang Eksternal. Selain aktif di bidang politik, Tsamara juga aktif di bidang sosial dengan menjadi salah satu pendiri LSM Perempuan Politik, organisasi yang bertujuan mengedukasi perempuan tentang politik dan memperjuangkan representasi perempuan dalam sistem politik. Sekarang ia menjadi bakal caleg PSI.

Perempuan 21 tahun ini mulai mencuri perhatian ketika ia terlibat twitwar dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pada Juli 2017. Balas argumen antar keduanya menyoal hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan pada wakil rakyat DPR RI. Selain di Twitter, Tsamara juga diperbincangkan karena keberaniannya menantang Fahri melalui video yang ia buat dengan judul “5 Sesat Pikir Fahri Hamzah”. Ada banyak yang ia bahas dalam video

tersebut salah satunya tentang pernyataan kasus E-KTP cuma khayalan, yang dikemukakan Fahri sebelumnya.

Tidak hanya disorot karena *twitwar* dengan Fahri Hamzah, Tsamara juga pernah tersangkut polemik dengan Pemerintah Rusia dan media Rusia yaitu *Russian Beyond The Headlines* atau RBTH. Lagi-lagi hal ini dipicu oleh kritik Tsamara terhadap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut Indonesia butuh pemimpin seperti Putin. Dalam akun Instagram-nya, Tsamara mengatakan Indonesia tak butuh sosok seperti Putin. Tsamara mengatakan Putin bukan contoh pemimpin yang baik. "Ia membungkam oposisi dan pers di Rusia sana," kata Tsamara Amany. Tsamara mengatakan di Rusia tidak ada kebebasan berinspirasi seperti di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, RBTH mengatakan ada kesalahpahaman mengenai pengetahuan Tsamara Amany mengenai politik dan sistem pers di Rusia. RBTH menyayangkan hal tersebut. Bahkan, Kedutaan Rusia untuk Indonesia mengadakan mediasi dengan Tsamara dan PSI untuk meluruskan hal tersebut.

Keberanian Tsamara sebagai politisi muda dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial memang patut diacungi jempol, namun ternyata tidak jarang komentarnya tersebut menuai kontroversi. Selain menuangkan pikiran-pikirannya melalui media sosial, Tsamara juga meluncurkan sebuah buku berjudul "*Curhat perempuan: tentang Jokowi, Ahok, dan isu-isu politik kekinian*" pada tahun 2017, yang merupakan buah-buah pikiran dan pengalaman Tsamara mengenai kepemimpinan Presiden Jokowi, dan isu-isu politik saat ini.

4.2 Profil Fahri Hamzah

Fahri Hamzah adalah seorang sarjana ekonomi kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, 10 November 1971. Saat ini beliau menjabat wakil ketua DPR semenjak 2014. Fahri tercatat pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990 hingga 1992. Dia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992. Di UI, Ia menjadi ketua umum Forum Studi Islam dan menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996-1997. Reformasi pada 1998, Fahri yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa Islam di Jakarta berperan dalam pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang, dan menjabat sebagai Ketua I pada periode 1998-1999.

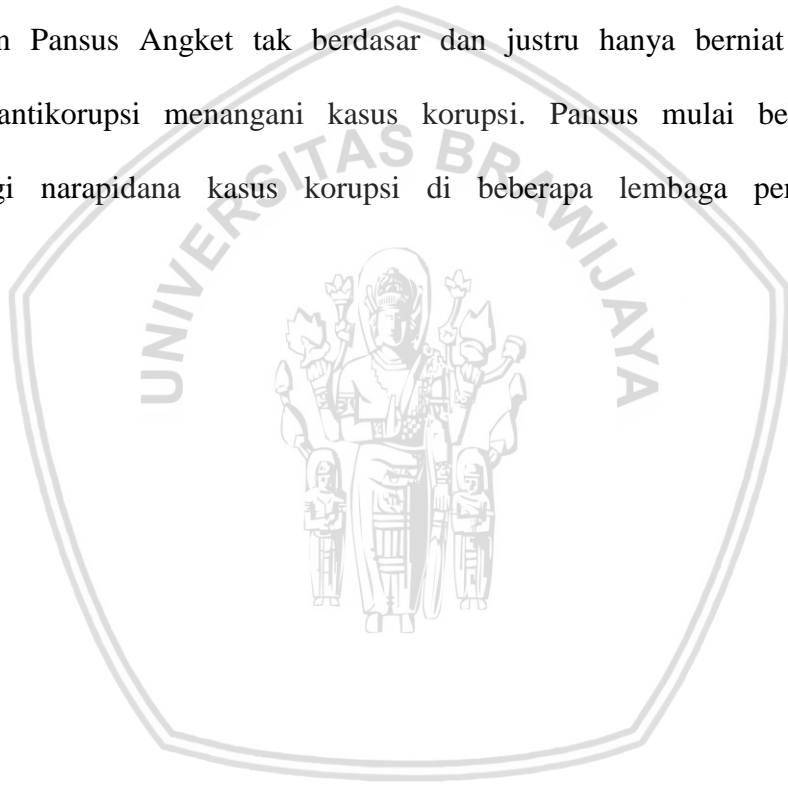
Sentiment pria berusia 46 tahun tersebut pada KPK mulai terlihat pada 3 Oktober 2011. Fahri Hamzah pernah mengajukan pembubaran KPK dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan fraksi DPR dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sendiri. Alsannya, KPK dianggap Fahri gagal menangani korupsi sistemik selama delapan tahun dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi. Ajuan Fahri tersebut mendapat dukungan dari elit fraksi PKS di DPR dan menganggap hal ini sebagai kebebasan Fahri berpendapat.

Semenjak itu, Fahri kerap melontarkan kritik pedas terhadap KPK, baik ketika diwawancarai media, maupun ia tuangkan sendiri lewat tulisan media sosialnya. Fahri mengkritik kinerja KPK selama 15 tahun yang dianggapnya gagal mencegah dan memberantas korupsi. Menurutnya, KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai drama dan tidak memberikan efek jera pada koruptor. Fahri merasa bahwa KPK telah melampaui kewenangan dan melangkahi privasi orang, seperti penyadapan dan operasi intelejen yang dilakukan pada rekannya, Setya Novanto.

4.3 Kasus Hak Angket KPK

Perselisihan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diawali dari anggapan anggota Dewan yang merasa bahwa KPK melanggar kewenangan otoritas, pada saat proses penyidikan dan penyelidikan tersangka korupsi. Karenanya, DPR membentuk panitia khusus (pansus) hak angket KPK untuk mempertanyakan kewenangan KPK yang dianggap melebihi kewenangannya. Kemunculan pansus hak angket KPK bertepatan dengan berjalannya penyelidikan korupsi E-KTP, di mana banyak anggota DPR disebut-sebut terlibat kasus tersebut.

Sebagian besar masyarakat bereaksi. Mereka menentang keberadaan Pansus Angket KPK, yang dianggap berpotensi melemahkan lembaga antikorupsi itu. Di lain pihak menilai DPR punya hak angket melakukan itu. Kedua lembaga tinggi negara ini saling berkeras hati dengan dalih masing-masing. DPR mengaku memanggil KPK karena punya hak angket, yang mengacu pada UU MD3. Sedangkan, KPK menilai keberadaan Pansus Angket tak berdasar dan justru hanya berniat melemahkan lembaga antikorupsi menangani kasus korupsi. Pansus mulai bekerja dengan mendatangi narapidana kasus korupsi di beberapa lembaga pemasyarakatan.





BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Video 01 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan

Tabel 5.1 Video 01 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Kasus E-KTP Cuma Khayalan

Fahri Hamzah	“E-KTP ini sudah selesai masa ada rugi 2,3 T dari mana ruginya? siapa yang ngomong itu rugi? Nah ini khayalan lagi!”
Tsamara Amany	“Khayalan? Ampun <i>deh</i> Pak Fahri, ada banyak banget <i>loh</i> anggota DPR yang diduga terlibat korupsi E-KTP. Itu namanya korupsi berjamaah, anggaran negara hasil keringat rakyat uang pajak rakyat dijadiin bahan <i>cak-an</i> gimana coba? Lagi pula <i>kalo</i> emang bersih jalanin aja proses hukumnya di KPK. Kalo bersih kenapa harus risih <i>sih</i> ? Masa malah bentuk hak angket nanti dikira sama orang –orang itu upaya melindungi teman sejawat <i>loh</i> . Berani jujur hebat!

Sumber: Olahan peneliti dari Instagram @psi.id, 2017.

a) Konteks

Pada video pertama ini, yang menjadi fokus pembahasan Tsamara adalah pernyataan Fahri Hamzah pada saat diwawancarai sebuah media

mengenai isu kerugian proyek E-KTP yang mencapai 2,3 Triliyun. Fahri merasa isu tersebut adalah “khayalan”. Sebagaimana diketahui, pansus hak angket KPK muncul bersamaan dengan penyidikan kasus E-KTP, yang bahkan menyeret Setya Novanto sebagai tersangka. Selain DPR membentuk pansus, Fahri Hamzah juga kompak menyangkal adanya kerugian mega proyek tersebut. Tidak heran apabila ada asumsi bahwa DPR dan secara khusus pada pembahasan ini adalah Fahri Hamzah, melindungi DPR dari adanya tuduhan bahkan penyelidikan terkait korupsi E-KTP.

Tsamara Amany sebagai perwakilan Partai Solidaritas Indonesia mengkritisi pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Tsamara Amany di PSI memang menjadi salah satu juru bicara yang fokus pada isu-isu transparansi politik dan pemerintahan serta antikorupsi. Pernyataan Fahri Hamzah yang menurut Tsamara terkesan sebagai *“upaya melindungi teman sejawat”* dikomentari pedas oleh Tsamara. Bagi Tsamara, apabila DPR merasa diri tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum, maka tidak perlu menghindari bahkan mencegah adanya penyelidikan oleh KPK.

b) Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur)

Video ini merupakan kritik Tsamara Amany terhadap Fahri Hamzah dan sikap DPR terhadap penyelidikan E-KTP oleh KPK. Topik atau makrostruktur narasi video ini berupa ringkasan kritik terhadap pernyataan Fahri Hamzah yang menganggap kerugian proyek E-KTP tidak benar adanya atau “khayalan”:

1. Dugaan keterlibatan beberapa anggota DPR pada kasus korupsi E-KTP. Bahkan Setya Novanto, eks ketua DPR dipenjara karena kasus tersebut.
2. Tsamara Amany mencurigai adanya upaya DPR menghalangi penyidikan KPK dengan membuat pansus hak anget KPK.

Perlu diketahui, pada 3 Oktober 2011 Fahri Hamzah pernah mengajukan pembubaran KPK dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan fraksi DPR dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sendiri. Alsannya, KPK dianggap Fahri gagal menangani korupsi sistemik selama delapan tahun dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi. Ajuan Fahri tersebut mendapat dukungan dari elit fraksi PKS di DPR dan menganggap hal ini sebagai kebebasan Fahri berpendapat.

c) Semantik (Makna Lokal)

Makna lokal berfungsi menyeleksi yang dibuat oleh penulis, pembicara, atau prodaktor, mengenai makna kata-kata atau struktur dan dihubungkan dengan konteks peristiwa yang terjadi dan ideologinya¹. Dalam video ini makna lokal bisa saja memiliki makna yang jamak. Mengingat bahasa digunakan sebagai media untuk menggiring isu, kepentingan, juga mengajukan pendapat. Walaupun tidak semua wacana yang muncul

¹Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, hlm.55

mengandung maksud-maksud tertentu, namun hal-hal yang menarik layak untuk dikaji. Berikut diuraikan data sekaligus pembahasan terkait ranah semantik.

“E-KTP ini sudah selesai masa ada rugi 2,3 T dari mana ruginya? siapa yang ngomong itu rugi? Nah ini khayalan lagi!”

Pernyataan Fahri di atas merupakan respon atas pernyataan KPK mengenai perkiraan kerugian Negara akibat korupsi E-KTP, yaitu sebesar Rp 2,3 T. Fakta tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo sebagaimana yang di muat oleh situs berita Kompas.com pada 1 Maret 2018. Jumlah kerugian yang dipertanyakan oleh Fahri tersebut dibantah oleh KPK. Menurut Agus, besarnya angka kerugian negara tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemilihan kata *“siapa yang ngomong itu rugi?”* menarik untuk dianalisis, karena sebagaimana keterangan Agus Rahardjo, besarnya kerugian tersebut tidak hanya ditentukan oleh KPK, namun oleh BPKP. Sebagai wakil ketua DPR yang instansinya sedang diselidiki dan menjadi perhatian masyarakat, tentu Fahri Hamzah berusaha melindungi nama baik dan menjaga kepercayaan masyarakat, namun bukan berarti fakta-fakta mengenai kerugian proyek E-KTP begitu saja dibiarkan, bahkan terkesan Fahri tidak mempercayai hasil perhitungan BPKP dan KPK. Belum lagi kalimat *“Nah ini*

khayalan lagi!” yang memperkuat sebrang pendapat dan sikap antara Fahri Hamzah dan KPK. Pernyataan Fahri seolah memposisikan DPR sebagai pihak yang “difitnah” oleh tudingan-tudingan KPK atau yang disebut Fahri sebagai “Khayalan”. Respon Fahri terhadap KPK tidak dipungkiri dapat dipengaruhi oleh posisi Fahri yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan oposisi pemerintah, dan akan tetap menjadi partai oposisi pemerintahan Jokowi-JK .

“Khayalan? ampun deh pak fahri, ada banyak banget loh anggota DPR yang diduga terlibat korupsi E-KTP”

Tsamara Amany pada kalimat ini berusaha memberikan fakta bahwa ada anggota DPR yang diduga maupun yang saat ini benar terbukti terlibat korupsi E-KTP.

“Itu namanya korupsi berjamaah, anggaran negara hasil keringat rakyat uang pajak rakyat dijadiin bahan cak-an gimana coba?”

Korupsi E-KTP menjerat beberapa anggota DPR dan pengusaha. Artinya, korupsi dilakukan secara bersama-sama atau “berjamaah”. DPR yang seharusnya menjadi pelindung dan perwakilan rakyat di pemerintahan malah menyalahgunakan kepercayaan dan uang rakyat.

“Lagi pula kalo emang bersih jalanin aja proses hukumnya di KPK. Kalo bersih kenapa harus risih sih? masa malah bentuk hak angket nanti dikira sama orang –orang itu upaya melindungi teman sejawat loh. Berani jujur hebat!”

PSI sebagai sebuah partai memiliki cita-cita atau tujuan, salah satunya seperti yang tertuang dalam platform PSI ke 7 mengenai politik, hukum, dan HAM. Salah satu poinnya secara tegas berbunyi “Memperkuat Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi”. Pada poin ini, PSI menjelaskan bahwa *“Periode 2019-2024 harus dijadikan periode pencegahan korupsi. Karena itu selain terus melanjutkan proses dan program pemberantasan dan penindakan korupsi, KPK harus fokus pada program pencegahan korupsi dengan melibatkan semua unsur masyarakat”*.

Pada pemilu 2019, PSI mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung Joko Widodo untuk maju pada periode berikutnya. Sehingga, dukungan terhadap KPK sebagaimana disampaikan oleh Tsamara pada video ini merupakan sikap dan misi PSI sebagai partai pendukung pemerintah. Tsamara sebagai juru bicara PSI yang fokus pada isu korupsi tentu saja akan mendukung segala bentuk pemberantasan korupsi oleh KPK.

d) Sintaksis

Analisis sintaksis adalah analisis yang berkaitan dengan susunan dan penataan kalimat penutur. Susunan dan penataan kalimat ini diramu sebaik mungkin dengan harapan tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Berikut akan disajikan analisis percakapan dalam lingkup sintaksis.

“E-KTP ini sudah selesai masa ada rugi 2,3 T dari mana ruginya? siapa yang ngomong itu rugi? Nah ini khayalan lagi!”.

Pernyataan Fahri di atas mengaskan pada proyek E-KTP yang sudah selesai dilaksanakan. Kata “sudah selesai” dapat diartikan bahwa Fahri menganggap pengadaan E-KTP telah dilaksanakan dengan baik oleh DPR dan tidak seharusnya diperbincangkan lagi. Fahri berusaha meyakinkan masyarakat bahwa proyek E-KTP baik-baik saja dan tidak ada kerugian pemerintah. Kata “khayalan” digunakan penutur (Fahri Hamzah) sebagai kata ganti untuk kata “mengada-ada”. Penutur merasa KPK dan BPKP sebagai pihak yang merilis angka kerugian pemerintah akibat proyek E-KTP sebagai pihak yang mengada-ada dan menuduh DPR.

*“Lagi pula kalo emang bersih jalanin aja proses hukumnya di KPK.
Kalo bersih kenapa harus risih sih?”*

Penutur (Tsamara Amany) menekankan kata *“kalo emang bersih jalanin aja proses hukumnya di KPK.”* yang merujuk pada dugaan keterlibatan anggota DPR dalam korupsi E-KTP, sekaligus tantangan bagi DPR untuk membuktikan klaim DPR tidak terlibat kasus tersebut. Selain itu, Tsamara tetap berusaha mempertahankan penyelidikan KPK agar tetap dijalankan.

e) **Stilisitik**

Kajian stilistik dalam analisis wacana kritis adalah kajian tentang pilihan kata yang digunakan penutur dalam menyampaikan pesan, maksud, dan ideologinya. Pilihan kata dalam bertutur sangat memengaruhi penerimaan

pesan oleh lawan tutur. Kasar, halus, lemah, dan lembut dalam berbahasa tidak hanya dipengaruhi oleh intonasi tuturan, tetapi juga pilihan kata. Berikut akan disajikan data dan analisis data yang didapat dari transkrip percakapan.

Pada video pertama, penutur (Fahri Hamzah) menggunakan kata “khayalan” sebagai pengganti kata “mengada-ada” atau “dibuat-buat”. Fahri Hamzah memilih untuk menggunakan kata kiasan yang tidak selugas kata “tidak” atau “mengada-ngada”. Pilihan kata ini digunakan untuk memperhalus bantahan penutur terhadap pertanyaan yang diberikan. Sebagai wakil ketua DPR yang sedang menjadi sorotan publik, penutur memilih untuk menggunakan sanggahan-sanggahan yang halus dan tidak secara langsung merujuk pada KPK.

Sama halnya dengan Fahri Hamzah, Tsamara Amany (TA) juga menggunakan kata-kata yang lebih halus berupa sindiran-sindiran dengan menggunakan bahasa informal sebagai berikut.

TA: *“Khayalan? ampun deh Pak Fahri...”*

TA: *“Kalo bersih kenapa harus risih sih?”*

TA: *“...nanti dikira sama orang –orang itu upaya melindungi teman sejawat loh”.*

Penggunaan bahasa yang informal mewakili karakter Tsamara sebagai politisi muda yang berasal dari partai anak muda dan berusaha membangun

pemahaman politik di kalangan orang muda. Dapat dipahami tentunya maksud dibuatnya video ini adalah untuk memberikan pandangan yang berbeda mengenai kasus E-KTP, tentu untuk menyesuaikan dengan target PSI yaitu anak muda, pemilihan kata yang digunakan harus dekat dan berhubungan dengan anak muda. Sindiran-sindiran yang digunakan oleh Tsamara terkesan digunakan untuk menjadikan video tanggapan ini lebih santai dan tidak intens layaknya debat politik pada umumnya, tanpa mengurangi keseriusan Tsamara untuk mematahkan pandangan Fahri Hamzah terhadap kasus E-KTP dan KPK.

f) Retoris

Kajian retorika dalam analisis wacana kritis Van Dijk menganalisis hal terkait grafis, metafora, dan ekspresi. Dalam penelitian ini hal yang dikaji dari ketiga poin tersebut adalah lingkup metafora. Berikut akan disajikan data dan analisis data yang berkaitan dengan metafora.

TA: *"Kalo bersih kenapa harus risih, sih?"*

TA: *"Berani Jujur, Hebat!"*

Metafora pada video ini digunakan oleh Tsamara Amany untuk memberikan sindiran kepada Fahri Hamzah yang dirasa menutupi kasus E-KTP dan menghalangi penyelidikan KPK. Karena keterbatasan durasi yang dimiliki oleh Instagram, penggunaan *punchline* yang singkat dan "pedas"

dapat merangkum inti pesan yang disampaikan dan menjadi daya tarik bagi audien.

5.2 Video 04 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK

Di mana?

Tabel 5.2 Video 04 Sesat Pikir Fahri Hamzah: Korupsi Tambah Banyak, Sukses KPK Di mana?

Fahri Hamzah	“Pertanyaanya kok 15 tahun KPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK dimana?” (Via Twitter)
Tsamara Amany	“Sejak KPK berdiri hingga saat ini, sudah ada 124 anggota DPR, 17 Gubernur dan 58 Walikota atau Bupati yang ditangkap oleh KPK itu belum termasuk Menteri, Hakim, Ketua Lembaga tinggi swasta, pejabat eselon hingga swasta ini adalah orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan mereka ini adalah orang-orang yang hobi mencuri uang rakyat. Baru sejak ada KPK mereka bisa berurusan dengan hukum dengan serius. Jadi, kalau misalnya tadi Fahri Hamzah bertanya seperti itu ya jawabannya mudah Pak Fahri! Ya karena KPK bekerja dengan efektif!”

Sumber: Olahan peneliti dari Instagram @psi.id, 2017.

a) Konteks

Pada video urutan keempat ini, Tsamara Amany mengomentari cuitan Fahri Hamzah pada akun Twitter miliknya yang menganggap bahwa dengan banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK adalah bentuk kegagalan KPK dalam memberantas korupsi. Tsamara merespon anggapan Fahri tersebut dengan fakta penangkapan yang dilakukan KPK, berbanding terbalik dengan Fahri, jumlah penangkapan yang diungkap oleh Tsamara dianggapnya sebagai pencapaian KPK dalam usaha memberantas korupsi.

b) Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur)

Video ini ditenggarai adanya selisih paham antara Tsamara Amany dan Fahri Hamzah dalam menilai banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK. Topik atau makrostruktur narasi video ini berupa ringkasan kritik terhadap pernyataan Fahri Hamzah yang menganggap OTT yang dilakukan terus menerus oleh KPK adalah sebuah bentuk kegagalan:

1. Tsamara membeberkan jumlah koruptor yang berhasil ditangkap oleh KPK yang dianggap oleh Tsamara sebagai hasil dari kerja KPK yang efektif.
2. Penangkapan yang terus dilakukan oleh KPK dianggap oleh Tsamara sebagai kesuksesan yang tidak perlu dipertanyakan, karena dapat mengusut kasus-kasus yang sebelumnya tidak dapat diusut sebelum terbentuknya KPK.

repository.ub.ac.id

c) **Semantik (Makna Lokal)**

Berikut diuraikan data sekaligus pembahasan terkait ranah semantik:

“Pertanyaanya kok 15 tahun KPK OTT makin banyak?Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak?”

Komentar Fahri Hamzah mengenai kinerja KPK yang dianggapnya belum atau tidak maksimal bukan pertama kali dilontarkan. Sebelumnya pada 3 Oktober 2011 Fahri Hamzah pernah mengajukan pembubaran KPK dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan fraksi DPR dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sendiri. Alsannya, KPK dianggap Fahri gagal menangani korupsi sistemik selama delapan tahun dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi. Fahri menilai semakin banyak OTT yang dilakukan oleh KPK, maka korupsi di Indonesia semakin merajalela.

“Lalu sukses KPK di mana?”

Bertambahnya OTT yang dilakukan KPK selama 15 tahun terakhir dianggap Fahri sebagai kegagalan KPK. Hal tersebut diungkapkan Fahri lewat kalimat yang mempertanyakan kesuksesan KPK. Kritik Fahri terhadap KPK kerap diutarakan Fahri lewat akun Twitter miliknya, maupun dalam berbagai wawancara di media. Bahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dianggap Fahri sebagai sebuah skandal. Sebagaimana pernyataan Fahri pada sebuah wawancara yang di muat oleh situs berita Detik pada 20 Februari 2018. Pada pemberitaan tersebut Fahri menantang KPK bahwa dirinya akan

membuktikan skandal KPK dengan membawa bukti-bukti yang ia miliki ke pihak kepolisian .

“Sejak KPK berdiri hingga saat ini, sudah ada 124 anggota DPR, 17 Gubernur dan 58 Walikota atau Bupati yang ditangkap oleh KPK itu belum termasuk Menteri, Hakim, Ketua Lembaga tinggi swasta, pejabat eselon hingga swasta”.

Angka-angka di atas merupakan fakta mengenai jumlah koruptor yang berhasil ditindak oleh KPK, yang dituturkan Tsamara Amany sebagai bentuk sanggahan terhadap tuduhan Fahri Hamzah terhadap KPK. Penutur memilih membuka data yang sifatnya terukur untuk menanggapi komentar Fahri yang belum secara kuat terbukti. Selain data tersebut digunakan Tsamara untuk melawan “sesat pikir Fahri Hamzah”, bukti-bukti tersebut dapat membuka wawasan masyarakat mengenai jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK, terlepas dari apakah OTT tersebut dinilai efektif atau tidak oleh masyarakat.

“Orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan mereka ini adalah orang-orang yang hobi mencuri uang rakyat. Baru sejak ada KPK mereka bisa berurusan dengan hukum dengan serius.”

Meskipun tidak bisa dipungkiri Tsamara lekat dengan ideologi dan sikap partai yang pro pemerintah dan KPK, namun pernyataan di atas dapat membuka pengetahuan mengenai bagaimana tidak korupsi di Indonesia berjalan setelah dan sebelum era KPK. Berdasarkan situs KPK, komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai pada tahun 1957. Pada 1957 dikeluarkan peraturan tentang Pemberantasan Korupsi Nomor

PRT/PM/06/1957 untuk mencegah terjadinya kasus korupsi dalam birokrasi.

Pada pemerintahan Megawati, terbentuklah Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (KPTPK) yang merupakan cikal bakal KPK.

“Jadi, kalau misalnya tadi Fahri Hamzah bertanya seperti itu ya jawabannya mudah Pak Fahri! Ya karena KPK bekerja dengan efektif!”

Tsamra Amany dan PSI dapat dikatakan menilai banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK adalah bentuk efektifitas kerja, sehingga tidak perlu dipertanyakan kesuksesannya. Pernyataan Tsamara di atas dapat dimaknai secara luas. Jelas bahwa dukungan terhadap KPK dilontarkan oleh Tsamara tidak terlepas dari ideologi dan dukungan PSI terhadap pemerintah, terutama pemerintahan Joko Widodo.

Makna lainnya, pernyataan di atas dapat dikritisi sebagai bahan refleksi masyarakat mengenai kinerja KPK. Perdebatan antara Fahri dan Tsamara dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kinerja lembaga Negara. Tentu akan ada pro dan kontra, namun perhatian masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran politik, bahkan keterlibatan masyarakat dalam politik.

d) Sintaksis

Analisis terhadap susunan dan penataan kalimat penutur pada video 4 disajikan sebagai berikut:

“Pertanyaanya kok 15 tahun KPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?”

Penutur memilih untuk menyampaikan kritik dengan melemparkan pertanyaan bernada sarkas. Penutur yang tidak secara langsung menyampaikan data-data yang sifatnya terukur menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menuduh, namun tidak secara langsung mengatakan KPK gagal dan menjelaskan secara faktual di mana kegagalan atau seberapa besar kegagalan KPK dalam memberantas Korupsi. Mengingat ujaran ini disampaikan lewat media sosial Twitter yang karakternya terbatas, maka kalimat singkat bernada sarkas di atas cukup untuk memantik komentar dari masyarakat.

“Sejak KPK berdiri hingga saat ini, sudah ada 124 anggota DPR, 17 Gubernur dan 58 Walikota atau Bupati yang ditangkap oleh KPK itu belum termasuk Menteri, Hakim, Ketua Lembaga tinggi swasta, pejabat eselon hingga swasta ini adalah orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan mereka ini adalah orang-orang yang hobi mencuri uang rakyat. Baru sejak ada KPK mereka bisa berurusan dengan hukum dengan serius. Jadi, kalau misalnya tadi Fahri Hamzah bertanya seperti itu ya jawabannya mudah Pak Fahri! Ya karena KPK bekerja dengan efektif!”

Apabila melihat struktur pesan dan pemilihan kata yang digunakan, penutur (Tsamara Amany) pada awal pesan membeberkan data faktual mengenai jumlah koruptor yang berhasil diberantas KPK. Selain dapat menjadi informasi yang

memperkaya pengetahuan masyarakat, data ini dimunculkan untuk menangkis pemikiran Fahri Hamzah yang dapat dikatakan kurang data. Namun, pada kalimat berikutnya sampai kalimat terakhir, Tsamara memberikan pandangan pribadi (yang tentu mencerminkan pandangan partai) mengenai kinerja KPK. Selain secara tidak langsung memunculkan sikap partai, pernyataan Tsamara dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai KPK.

e) Stilistik

Kajian stilistik dalam analisis wacana kritis adalah kajian tentang pilihan kata yang digunakan penutur dalam menyampaikan pesan, maksud, dan ideologinya. Adapun analisis stilistik pada wacana ini adalah sebagai berikut:

Hampir sama seperti video 1, pada video 4 Fahri Hamzah melontarkan kritik pedas, namun tidak langsung merujuk pada tuduhan dan bukti terhadap tuduhan yang dimilikinya. Pada video keempat ini, Fahri “memperhalus” tuduhan terhadap kegagalan KPK memberantas korupsi dengan mempertanyakan “*Lalu suksesnya di mana?*”. Benar bahwa selama 15 Tahun KPK berdiri angka OTT semakin bertambah, namun indikator kesuksesan KPK tentu tidak hanya diukur dari OTT yang dilakukan. Meskipun Fahri identitik dengan sentimennya terhadap KPK, apabila kritik Fahri dilihat lebih jauh, sebenarnya mengkritisi lembaga Negara adalah hal yang baik dan penting untuk dilakukan oleh masyarakat, namun tentu mengkritisi sesuatu

diperlukan bukti dan pemikiran yang sebisa mungkin netral (bebas kepentingan) agar penilaian dapat dilakukan secara maksimal.

Tsamara Amany pada video ini lebih banyak memberikan data mengenai OTT KPK, dan tentu seperti video sebelumnya, menyanggah dan membela KPK dari tuduhan-tuduhan Fahri Hamzah.

TA: *Jadi, kalau misalnya tadi Fahri Hamzah bertanya seperti itu ya jawabannya mudah Pak Fahri! Ya karena KPK bekerja dengan efektif!*

Tsamara mengakhiri video keempat dengan menjawab pertanyaan Fahri mengenai kesuksesan KPK. Dengan menggunakan kata-kata yang ringan dan informal ala Tsamara Amany, video ditutup dengan kesimpulan bahwa menurut Tsamara (dan PSI) KPK telah bekerja dengan efektif, meskipun di awal sempat dibeberkan data-data faktual.

f) Retoris

Kajian retorik dalam analisis wacana kritis Van Dijk menganalisis hal terkait grafis, metafora, dan ekspresi. Dalam penelitian ini hal yang dikaji dari ketiga poin tersebut adalah lingkup metafora. Berikut akan disajikan data dan analisis data yang berkaitan dengan metafora.

FH: *“... lalu suksesnya di mana?”*

Pertanyaan menyentil dari Fahri Hamzah adalah sarkasme terhadap jumlah OTT KPK yang berkembang jumlahnya. Selain sindiran, kalimat yang

merupakan *punchline* dari keseluruhan cuitan Fahri dapat menjadi refleksi bagi kita dalam menilai KPK, tentu bisa saja setuju atau tidak dengan Fahri yang merasa KPK gagal memberantas korupsi.

TA: “...jawabannya mudah Pak Fahri! Ya karena KPK bekerja dengan efektif!”

Tsamara Amany menggunakan kalimat di atas yang memberikan kesan bahwa pertanyaan sindiran Fahri Hamzah merupakan suatu hal yang mudah dijawab dan tidak perlu dipermasalahkan. Tsamara cenderung menggunakan kata-kata yang santai namun lugas untuk membalas retorika sarkas khas Fahri Hamzah. Tsamara menanggapi kritik-kritik Fahri dengan kalimat yang santai dan khas anak muda, menggambarkan bahwa Tsamara mampu bersanding dan adu pendapat dengan politisi senior.

5.3 Fahri Hamzah dan KPK

Fahri Hamzah disebut oleh harian *online* Republika.co.id sebagai “garda terdepan” dalam memberikan kritik pedas pada KPK². Bahkan dalam pemberitaan tersebut disebut bahwa citra Fahri Hamzah begitu melekat dengan KPK. Namun sebenarnya hobi Fahri Hamzah menjadi kontroversi tidak hanya seputar perseteruannya dengan KPK saja. Fahri bahkan dipecat oleh partai pengusungnya sendiri yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada 11 Maret 2016 Majelis Takhim

²Mansur, Ali. (2018, 16 Februari). Kerap Kritik Pedas KPK, Ini Alasan Fahri Hamzah. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/16/p47ex5440-kerap-kritik-pedas-kpk-ini-alasan-fahri-hamzah>.

PKS memutuskan pemecatan pada Fahri dari seluruh jenjang jabatan kepartaian, dan pada 1 April 2016 SK DPP terkait keputusan Majelis Takhim tersebut ditandatangani oleh presiden PKS Sohibul Iman. PKS melakukan pemecatan terhadap Fahri dengan alasan bahwa tindakan Fahri tidak sesuai lagi dengan arah partai. Fahri dianggap oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS cenderung membela Setya Novanto pada kasus “*Papa Minta Saham*”. Tidak hanya itu, PKS juga merasa terganggu dengan komentar Fahri Hamzah yang menyebut anggota DPR “*rada-rada beloon*” yang berujung penjatuhan sanksi oleh MKD.

Ceplas-ceplos a la Fahri Hamzah juga pernah diteliti dalam sebuah skripsi tahun 2016 berjudul “*Dari Aktivis Kampus Menuju Gedung Parlemen: Studi Komunikasi Politik Genre Political Actor & Rhetoric Tentang Fahri Hamzah*” oleh Nur Mufidatul Hanum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pada penelitian ini Fahri Hamzah menilai gaya bahasanya yang *to the point* dan kontroversial tersebut karena dirinya menilai bahwa kebenaran lebih tinggi nilainya daripada sopan santun³. Hanum juga menyimpulkan bahwa Fahri Hamzah menampilkan diri sebagai oposisi atau pengkritik pemerintah. Tidak hanya pada pemerintahan Jokowi saat ini, pada jaman pemerintahan sebelumnya pun SBY tidak luput dari kritik Fahri yang tidak hanya pedas, namun menurut Hanum juga tidak sopan.

³Hanum, N. M. (2016). *Dari Aktivis Kampus Menuju Gedung Parlemen: Studi Komunikasi Politik Genre Political Actor & Rhetoric Tentang Fahri Hamzah*. Malang: Universitas Brawijaya.

Dari semua tokoh dan instansi yang paling sering menjadi bulan-bulanan Fahri Hamzah, menurut peneliti KPK adalah “musuh bebuyutan”. Bagaimana tidak, kritik Fahri tidak pernah berhenti terhadap KPK, bahkan keinginan Fahri untuk meminta pemerintah membubarkan KPK tidak pernah padam. 3 Oktober 2011 Fahri Hamzah pernah mengajukan pembubaran KPK dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan fraksi DPR dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sendiri. Alsannya, KPK dianggap Fahri gagal menangani korupsi sistemik selama delapan tahun dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Ajuan Fahri tersebut mendapat dukungan dari elit fraksi PKS di DPR dan menganggap hal ini sebagai kebebasan Fahri berpendapat. Tahun 2013 dan 2015 Fahri juga tetap memperjuangkan hal yang sama yaitu pembubaran KPK⁴. Drama sentimen Fahri Hamzah memuncak pada 2016 saat ia naik pitam karena KPK menggeledah ruang PKS di DPR. Mungkin kalimat terbaik menyimpulkan keteguhan Fahri membubarkan KPK adalah sebagaimana judul berita harian *online* Merdeka.com pada 5 Oktober 2017, “*Tak Bosan-bosannya Fahri Hamzah Minta KPK di Bubarkan*”⁵.

⁴Hanum, N. M. (2016). Dari Aktivis Kampus Menuju Gedung Parlemen: Studi Komunikasi Politik Genre Political Actor & Rhetoric Tentang Fahri Hamzah. Malang: Universitas Brawijaya.

⁵Fadil, Iqbal. (2017, 5 Oktober). Tak Bosan-bosannya Fahri Hamzah Minta KPK di Bubarkan. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-bosan-bosannya-fahri-hamzah-minta-kpk-dibubarkan.html>

Apabila dikaitkan dengan temuan data yang disajikan sebelumnya, jelas terlihat komentar-komentar Fahri terhadap KPK bernada negatif. Selain gaya retorika politiknya yang memang kontroversial, sejarah Fahri Hamzah sebagai kritikus oposisi pemerintah juga dapat menjadi tolak ukur dalam memahami wacana video *Sesat Pikir Fahri Hamzah*. Pada video pertama yang bertema “*Kasus E-KTP Cuma Khayalan*”, dapat dipahami respon Fahri Hamzah terhadap tuduhan KPK sebagai upaya melindungi instansi yang dipimpin, terlebih dari musuh lama seperti KPK. Keseriusan Fahri menangkak dan melindungi DPR melahirkan pansus hak angket KPK.

5.4 Tsamara Amany dan Sikap Pro KPK

PSI resmi bergabung dengan 8 partai lainnya dalam koalisi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilu presiden 2019. Menurut peneliti, ini bukanlah hal yang tidak terduga. Sebelum resmi menjadi koalisi Jokowi-Ma'ruf, PSI berkunjung ke istana bertemu dengan Jokowi. Dari berita yang dilansir dari situs berita online CNN Indonesia, ketua umum PSI menyatakan kunjungan partainya ke istana bukan membicarakan kemenangan Jokowi di pilpres 2019. PSI mengakui menceritakan target PSI untuk menang pemilu 2019 kepada Jokowi, dan oleh Jokowi diberi tips untuk hal tersebut. Bahkan setelah pertemuan tersebut diadakan, foto anggota DPP PSI bersama Jokowi saat kunjungan ke istana dipasang menjadi banner *website* resmi PSI. Dapat disimpulkan, PSI pro pemerintahan Jokowi sehingga tidak heran kini bergabung menjadi koalisi.

Tsamara Amany selain menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksternal, ia juga menjadi salah satu dari 13 juru bicara PSI. Bidang yang ia bawahi adalah isu pemberantasan korupsi. Selayak dan sepantasnya bagi partai untuk turut berperan dalam memberantas korupsi. Terutama karena selama ini partai politik sebagai institusi paling korup di Indonesia dianggap menjadi beban ketimbang solusi bagi permasalahan di negeri ini⁶. Konten “5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” yang dibawakan langsung oleh Tsamara dipilih pada penelitian ini karena menurut peneliti konten ini dapat menjadi multitafsir apabila dikaji melalui perspektif kritis analisis konten.

Dua video yang telah dianalisis melalui metode Van Dijk memberikan gambaran mengenai beberapa substansi utama dibuatnya video reaksi tersebut. Tsamara Amany sebagai penutur memberikan reaksi negatif terhadap pernyataan Fahri Hamzah di beberapa media mengenai KPK. Negatif disini berarti Tsamara bersebrangan pendapat dengan Fahri Hamzah. Dalam menanggapi tuduhan-tuduhan Fahri terhadap KPK, yang dari tampak luar dapat dikatakan sebagai opini tanpa data yang mendukung, Tsamara lebih banyak membantah dengan mengeluarkan data survei. Selain itu, Tsamara sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat mengundang audiens untuk berpikir demikian pula. Pernyataan-pernyataan

⁶Haris, S. (2006). Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia. Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik, (p. 67). Jakarta.hlm. 63

Tsamara yang menentang pemikiran Fahri dapat dinilai sebagai referensi bagi masyarakat untuk menilai kinerja KPK. Meskipun tidak bisa dipungkiri sikap matimatian membela KPK adalah partisipasi partai memberantas korupsi, namun dukungan terhadap KPK bagi PSI juga berarti menjelaskan posisi PSI di pemerintahan saat ini.

Hasil survei Alvira Research Center yang di muat oleh harian Kompas.com menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja KPK dan Polri. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK sebesar 78,8 persen. KPK mengalami kenaikan 1,6 persen dibanding hasil sebelumnya pada Februari 2018 yakni 77,2 persen. Di sisi lain DPR menempati posisi terendah pada poin 51,8 persen, turun 5 persen dari Februari 2018 yakni 56,8 persen⁷. Survei yang terlebih dahulu dilakukan oleh Poltracking Indonesia pada tahun 2017 juga tidak jauh berbeda. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap KPK berada pada poin 56 persen, sedangkan DPR 34 persen. Apabila menyimpulkan dari hasil dua lembaga survei yang berbeda, yang melakukan survei pada waktu yang berbeda pula, konstan terlihat bahwa terjadi ketimpangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPR dan KPK. Keduanya memperlihatkan hasil bahwa kepuasan masyarakat terhadap institusi pemerintahan yang paling rendah nilainya adalah DPR.

⁷Erdianto,Kristian. (2018, 28 Mei). Survei: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK dan Polri Meningkat, DPR Terendah, hlm. 56

Apabila hasil survei kompak bahwa masyarakat puas dengan kinerja KPK, maka argumen Tsamara Amany vs Fahri Hamzah dapat dinilai sebagai pertentangan politis. Dari hasil survei, masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja KPK, artinya mayoritas masyarakat sependapat dengan Tsamara Amany bahkan jauh sebelum video ini dibuat. Peneliti menilai adanya faktor ideologi politik yang memicu lahirnya video Tsamara vs Fahri Hamzah ini. Pada video ini, Tsamara jelas menyerang Fahri Hamzah secara personal dan institusi yang ia bawahi (DPR).

Terkait perang pendapat antar politisi di media sosial, sebuah penelitian berjudul “*Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial; Perspektif Netizen Indonesia*” yang ditulis oleh Iswandi Syahputra dari Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, pada tahun 2017 menjelaskan bahwa perang siber saat ini dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat masyarakat. Perang siber telah membentuk polarisasi *netizen*, yaitu kelompok konservatif dan liberal. Keduanya aktif memproduksi opini, wacana, informasi, isu dan rumor di media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dan pergeseran konsep *opinion leader* menjadi *opinion maker*. Di mana, *opinion maker* dalam tradisi *new media* memungkinkan siapapun secara anonim menjadi *opinion leader*⁸. Syahputra menjelaskan kecenderungan perang siber di Indonesia bersifat semantic, artinya aktor

⁸Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial; Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 457.hlm. 26

media sosial sengaja memproduksi konten untuk menghancurkan wacana normatif dan realitas sistem kekuasaan saat ini.

Apabila dikaitkan dengan konteks video Tsamara vs Fahri Hamzah, penelitian Syahputra menjelaskan bahwa keterbatasan media sosial Twitter dalam mengakomodir konten dapat mendorong sebuah wacana untuk dikembangkan pada media lain yang lebih memberi keleluasaan. Hal ini terjadi pada video Tsamara vs Fahri Hamzah. Tsamara Amany membuat video reaksi dari kumpulan komentar Fahri di Twitter dan wawancara televisi, di mana keduanya tidak memberikan keleluasaan bagi Tsamara, sehingga ia memutuskan untuk membuat video Instagram. Meskipun video ini tidak sampai pada ujaran kebencian, namun pada penelitian di atas menjelaskan adanya kecenderungan perbincangan saling serang dan berujung ujaran kebencian pada momen-momen menjelang pemilihan umum⁹.

Dari penjabaran di atas, peneliti menilai bahwa video Tsamara vs Fahri Hamzah ditujukan untuk membangun pandangan masyarakat atas sikap PSI sebagai partai baru peserta pemilu 2019. Sebagai partai baru, PSI membutuhkan popularitas dan elektabilitas untuk dapat maju ke parlemen. Untuk mencapai popularitas, PSI membutuhkan *exposure* dari media. Meskipun masa kampanye resmi belum dimulai, penting bagi PSI untuk mulai memperkenalkan diri ke masyarakat. Salah satu jalur yang ditempuh PSI untuk hal ini adalah melalui media sosial. Video Tsamara vs Fahri

⁹Ibid., hlm. 61

Hamzah yang telah ditonton kurang lebih 6000 kali sejak tayang pada 5 Juli 2017 lebih bersifat pernyataan posisi politik PSI saat ini, ketimbang memberikan edukasi bagi publik mengenai kinerja KPK. Hal ini didasari pada asumsi bahwa berbagai wacana, isu, rumor, dan informasi di media sosial memiliki relasi dengan kepentingan politik praktis, maka kontennya mengandung manifestasi ideologi dan sikap politik tertentu¹⁰.

Pada video ini, Tsamara memberikan penjelasan yang bersifat permukaan terhadap kritik Fahri Hamzah atas KPK. Serangan yang bersifat personal dan penggunaan jargon-jargon KPK dalam kalimatnya menunjukkan keberpihakan Tsamara dan PSI terhadap KPK. Meskipun keberpihakan tersebut adalah hal yang wajar dan sah, namun kerancuan maksud hadirnya video ini dan arah argumen pada video ini dapat memicu ketegangan pada masyarakat. Sejarah hubungan kurang harmonis antara Fahri Hamzah dengan KPK dan posisi PSI sebagai partai pendukung pemerintahan menjadi pertimbangan dalam menafsirkan video ini. Kebutuhan PSI akan perhatian masyarakat juga menjadi faktor utama dalam menilai video ini secara kritis.

5.5 Video Reaksi sebagai *Political Branding* PSI

Video reaksi “5 Sesat Pikir Fahri Hamzah” merupakan hasil dari penggunaan media sosial dalam politik. Media sosial menjadi platform komunikasi politik, yang dalam penelitian ini komunikasi politik yang dilakukan oleh PSI dengan tujuan

¹⁰Ibid., hlm.72

menjadi wadah ide masyarakat yang kemudian menjadi opini publik dan meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, *agenda setting*, maupun komentator-komentator politik¹¹. Apabila dikaitkan dengan analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial terhadap video ini, muatan dari video reaksi ini lebih fokus pada adu pendapat antara Tsamara Amany terhadap tudingan Fahri Hamzah atas KPK dan kasus korupsi E-KTP dari pada mengedukasi masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi antara KPK dan kasus E-KTP.

Meskipun video ini bisa saja digunakan mengedukasi masyarakat yang yaitu melalui metode *educative*. Metode *educative* adalah usaha mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan dalam wujud pendapat, fakta, dan pengalaman yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak¹². Namun dari hasil analisis terhadap teks dan keadaan sosial yang melatarbelakangi kemunculan video ini, ditemukan lebih banyak argumentasi yang didasari oleh ideologi dan sikap partai yang diwakili oleh Tsamara Amany, yaitu Partai Solidaritas Indonesia.

Keputusan PSI untuk menggunakan media sosial dalam komunikasi politik dapat dipahami karena peran media sosial mengubah pola komunikasi politik yang tadinya *top to bottom*, menjadi *bottom to top*, menyebabkan *grassroot movement*. Keadaan ini memungkinkan publik atau kelompok yang tadinya terpinggirkan dalam

¹¹Cangara, Hafied. (2009). Pengantar Ilmu Komunikasi.hlm. 56

¹²Ardial. (2009). Komunikasi Politik.hlm.71

siklus politik saat ini memiliki pengaruh yang berarti dalam politik¹³. Dibuktikan dengan peningkatan partisipasi orang muda dalam proses politik, yang secara langsung disebabkan oleh penggunaan media sosial. Namun, penggunaan media sosial tidak menjamin keberhasilan komunikasi politik. Media sosial memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dalam politik, namun aplikasi konsep marketing yang strategis menentukan kesuksesan maupun kegagalan penggunaan media sosial dalam politik.

Kegunaan media sosial sebagai alat pemasaran politik menjadi beresiko karena sering kali berjalan tanpa pengawasan yang baik dan sering disalahgunakan karena membanjiri khalayak dengan iklan yang tidak relevan dan konten-konten yang bersifat “request”. Media sosial juga dimanfaatkan oleh Tsamara Amany dan PSI untuk membangun *brand* partai dan kebijakan partai. Membangun *brand* kebijakan partai dimaksudkan untuk membuat sebuah pesan dengan tema tunggal yang meringkas sikap partai mengenai beberapa substansi. Hal ini disebut sebagai *the broadcast and the narrowcast messages*. *The broadcast message* adalah gagasan bahwa kampanye politik harus didasari dengan mengidentifikasi tema atau nilai utama yang akan dibawa oleh partai, posisi partai, yang dimana tema tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa subtema yang disebut sebagai *the narrowcast message*.

¹³ Ayankoya, K., Cullen, M., & Calitz, A. (2014). Social Media Marketing in Politics. International Marketing Trends (p. 11). Venice: Nelson Mandela University.hlm 67

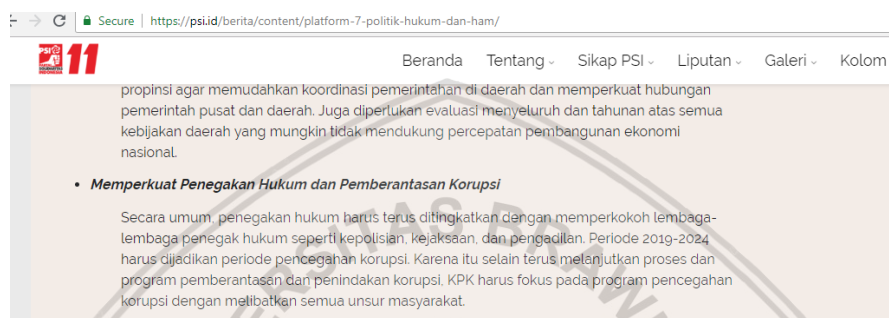
PSI dalam menentukan kebijakannya dijiwai oleh empat gagasan utama (*the broadcast message*) yaitu kebajikan, keragaman, keterbukaan, dan meritokrasi. Empat poin utama tersebut kemudian diturunkan ke dalam delapan tema kebijakan publik yaitu 1) Politik, Hukum dan HAM; 2) Hubungan Luar Negeri; 3) Ekonomi dan Pembangunan; 4) Sosial dan Budaya; 5) Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi; 6) Lingkungan Hidup dan Pariwisata; 7) Energi dan Sumber Daya Alam; 8) Kesejahteraan Rakyat. Beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan partai merupakan bagian sentral dalam melakukan *branding* karena partai dan kandidat bisa saja membahas hal lain tetapi kebijakan adalah hal yang konsisten dan sulit diubah¹⁴.

PSI cukup vocal dalam memasarkan kebijakannya melalui media sosial. Salah satu yang paling mencolok adalah konsistensi PSI mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Salah satunya dengan membuat sebuah video berjudul “5 Sesat Pikir Fahri Hamzah”. Video ini adalah reaksi Tsamara Amany terhadap beberapa pernyataan Fahri Hamzah yang mengkritik kinerja KPK bahkan meminta pemerintah untuk membubarkan KPK.

Video yang berawal dari *tweetwar* antara Tsamara dan Fahri di Twitter kemudian di angkat sebagai konten *branding* kebijakan, atau yang disebut Tsamara sebagai edukasi kepada publik. Narasi antikorupsi memang merupakan salah satu

¹⁴Mensah, A. K. (2011). Political Brand Management: Forms and Strategies in Modern Party Politics. Sheffield: The University of Sheffield.hlm.32

narasi utama PSI. Narasi tersebut dituangkan oleh PSI pada tema kebijakan publik atau yang disebut PSI sebagai *platform 7* yaitu Politik, Hukum, dan HAM.



Gambar 5.1 Kebijakan PSI Terkait KPK

Sumber: www.psi.id, 2018.

Pada gambar 5.1 PSI jelas menyatakan keinginan menjadikan periode pemerintahan selanjutnya sebagai periode pencegahan korupsi dan terlihat harapan PSI akan peran KPK dalam melakukan pencegahan korupsi. Intinya, PSI mendukung eksistensi KPK. Kebijakan ini disebarluaskan oleh PSI dalam bentuk konten media sosial salah satunya melalui video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang kpk”. Pada video tersebut Tsamara membantah beberapa komentar Fahri Hamzah mengenai KPK yang dianggap tidak efektif oleh wakil ketua DPR tersebut dengan mengacu beberapa survei yang menunjukkan peningkatan kinerja KPK.

Sebagai politisi yang sangat muda dan masih baru di dunia politik, penting bagi Tsamara Amany untuk membangun citra politiknya, begitu pula dengan

PSI. Terutama fakta bahwa PSI merupakan partai yang benar-benar baru, bukan pecahan dari partai yang sudah ada, tentunya membutuhkan usaha yang lebih keras untuk dapat bersaing secara popularitas maupun elektabilitas dengan partai-partai pendahulu. Apabila dilihat dari pola *branding* yang dilakukan, PSI fokus menggunakan media sosial sebagai alat utama. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye terbukti mampu mengurangi biaya kampanye partai, sehingga sangat cocok digunakan bagi partai baru yang minim dana dan minim jangkauan persebaran informasi¹⁵.

Wacana yang dibangun oleh Tsamara Amany mengenai dukungannya dan PSI terhadap kinerja KPK dan dukungan untuk melanjutkan penyidikan kasus korupsi E-KTP dapat dipahami sebagai sikap PSI yang pro pemerintah. Pada pemilu 2019 PSI merupakan salah satu partai koalisi calon presiden petahana Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin. Dengan mendukung KPK yang merupakan produk pemerintah, PSI menunjukkan keseriusan dalam mendukung Joko Widodo yang merupakan calon presiden petahana. Terutama, pada saat video ini diunggah, masa kampanye resmi belum dimulai. Sehingga dapat dipahami bahwa video ini merupakan sinyal arah dukungan PSI sebelum secara resmi bisa berkampanye dan mengusung calon presiden Joko Widodo dan usaha PSI membangun konstruksi atas sikap PSI pada pemilu 2019 di benak khalayak.

¹⁵Jungherr, A. (2014). The Logic of Political Coverage on Twitter: Temporal Dynamics and Content. *Journal of Communication*, 240.hlm. 29

Terlebih pada PSI yang merupakan partai baru pada pemilu 2019, menciptakan *image* yang diinginkan pada benak pemilih diperlukan tidak hanya untuk membangun kesan, namun mendorong khalayak untuk memilih PSI. Media sosial dalam menyebarkan berita politik, melalui dua tahap yaitu produksi berita oleh media dan pemimpin opini (*opinion leader*) menyebarkan berita tersebut pada tautan media sosial mereka¹⁶. Peran *opinion leader* pada video ini yaitu Tsamara Amany adalah menyebarkan informasi yaitu sikap PSI terhadap, KPK dan kasus korupsi E-KTP melalui video reaksi 5 sesat fikir Fahri Hamzah yang di unggah pada akun instagram PSI.



¹⁶Feezell, J. T. (2017). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. *American Politics*, 3.hlm. 28

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” menggunakan Analisis Wacana Kritis Van Dijk, maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” apabila dilihat secara analisis teks menggunakan gaya bahasa informal, dan kritik disampaikan dengan metafora yang bersifat satir dan sarkas. Dalam memberikan tanggapan terhadap pernyataan Fahri Hamzah, Tsamara Amany juga menyelipkan slogan-slogan KPK dan daya survei untuk memperkuat argument.
2. Secara kognisi sosial, wacana Tsamara Amany pada video ini yang pro terhadap KPK dapat dipahami sebagai sikap Tsamara dan PSI sebagai partai pro pemerintah. Lebih lagi, saat ini PSI merupakan partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo- Ma'ruf Amin pada pemilu 2019. Sikap ini ditunjukkan Tsamara pada videonya dengan menyampaikan fakta-fakta yang mendukung kinerja KPK dalam melakukan tugasnya.

3. Secara konteks sosial video ini dapat dianggap sebagai merupakan pencitraan politik karena mengandung wacana yang mempengaruhi, mendebat, dan bereaksi yang oleh Van Dijk dinilai sebagai sebuah praktik kekuasaan. Narasi yang disampaikan oleh Tsamara Amany bermuatan sikap politik yang dapat mempengaruhi khalayak dan sifatnya persuasif. Video ini juga dikemas untuk mendebat pendapat Fahri Hamzah.

Dari ketiga poin yang telah dijabarkan secara analisis teks, kognisi dan konteks sosial dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil analisis wacana kritis pada “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” didapati bahwa video tersebut merupakan *political branding* PSI, karena video ini merupakan komunikasi politik bermuatan ideologi dan arah dukungan politik PSI yang kemudian melalui video ini dapat disebarkan dan menjadi opini publik.

6.2 Saran Akademis

Penelitian ini terbatas pada video “Tsamara Menjawab: 5 Sesat Pikir Fahri Hamzah Tentang KPK” saja, sehingga dibutuhkan penelitian berkelanjutan mengenai analisis wacana kritis pada konten media sosial baik Tsamara Amany maupun PSI agar dapat lebih lanjut melihat bagaimana pola keduanya membangun konstruksi realitas di benak masyarakat. Bias informasi pada media sosial partai politik juga menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya dengan menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif. (2018). *Konstruksi Realitas Sosial dari Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram*. Depok: Universitas Indonesia.
- Eriyanto. (2003). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fajarwaty, P. U. (2015). *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Tentang Penampilan Citra Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Headline Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Media Indonesia Periode November 2014 - April 2015*. Depok: Universitas Indonesia.
- Feezell, J. T. (2017). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. *American Politics*, 3.
- Hepp, A., & Couldry, N. (2017). *The Mediated Construction of Reality*. Malden: Polity Press.
- Hoed, B. H. (2007). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Jungherr, A. (2014). The Logic of Political Coverage on Twitter: Temporal Dynamics and Content. *Journal of Communication*, 240.
- Nišić, V., & Plavšić, D. (2014). The role of media in the construction of social reality. *Sociological Discourse*, 73.
- Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S. A., Parnet, O., & Benoit, K. (2016). Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament. *Electoral Studies*, 5.
- Salman, A., Saleh, M. A., Mustaffa, N., & Ali, M. N. (2016). Social Media and Agenda Setting: Implications on Political Agenda. *Malaysian Journal of Communication*, 38.
- Spaiser, V., Chadeaux, T., Donnay, K., Russmann, F., & Helbing, D. (2017). Communication power struggles on social media: A case study of the 2011–12 Russian protests. *Journal of Information Technology & Politics*, 132.

Stieglitz, S., & Brockmann, T. (2012). Usage of Social Media for Political Communication. *Pacific Asia Conference on Information System (PACIS)*, 3.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif. (2018). *Konstruksi Realitas Sosial dari Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram*. Depok: Universitas Indonesia.
- Eriyanto. (2003). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fajarwaty, P. U. (2015). *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Tentang Penampilan Citra Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Headline Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Media Indonesia Periode November 2014 - April 2015*. Depok: Universitas Indonesia.
- Feezell, J. T. (2017). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. *American Politics*, 3.
- Hepp, A., & Couldry, N. (2017). *The Mediated Construction of Reality*. Malden: Polity Press.
- Hoed, B. H. (2007). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Jungherr, A. (2014). The Logic of Political Coverage on Twitter: Temporal Dynamics and Content. *Journal of Communication*, 240.
- Nišić, V., & Plavšić, D. (2014). The role of media in the construction of social reality. *Sociological Discourse*, 73.
- Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S. A., Parnet, O., & Benoit, K. (2016). Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament. *Electoral Studies*, 5.
- Salman, A., Saleh, M. A., Mustaffa, N., & Ali, M. N. (2016). Social Media and Agenda Setting: Implications on Political Agenda. *Malaysian Journal of Communication*, 38.

- Spaiser, V., Chadeaux, T., Donnay, K., Russmann, F., & Helbing, D. (2017). Communication power struggles on social media: A case study of the 2011–12 Russian protests. *Journal of Information Technology & Politics*, 132.
- Stieglitz, S., & Brockmann, T. (2012). Usage of Social Media for Political Communication. *Pacific Asia Conference on Information System (PACIS)*, 3.

